



**KAJIAN FAKTOR KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI, DAN
STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN BENCANA
(Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di
Kecamatan Panti dan Silo)**

SKRIPSI

Oleh
Arifandi Hutomo F
NIM 112110101145

**BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**KAJIAN FAKTOR KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI, DAN
STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

**(Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di
Kecamatan Panti dan Silo)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat
dan mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh

Arifandi Hutomo Fathoni
NIM 112110101145

**BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

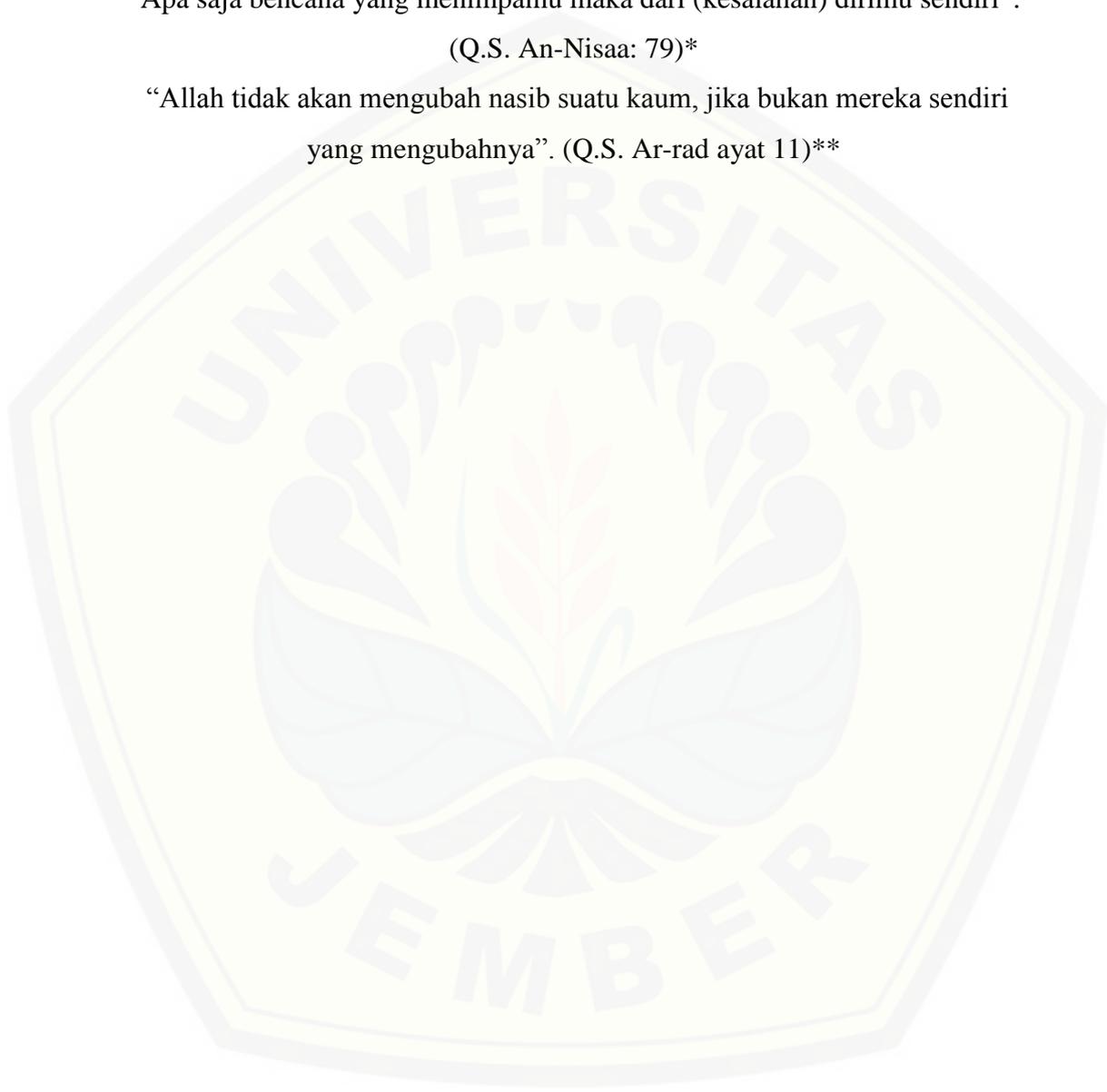
1. Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Papa Soewasis dan Ibu Sunarwati dan adik- adik tercinta, Ahmad Adam Adhitama dan Devita Ayun Sari.
3. Guru-guru saya sejak TK, SD, SMP, SMA, serta dosen-dosen yang telah memberikan ilmu bermanfaat, membimbing dan mengajari saya.
4. Agama, Bangsa, dan Negara, serta Almamater tercinta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

MOTTO

“Apa saja bencana yang menimpamu maka dari (kesalahan) dirimu sendiri”.

(Q.S. An-Nisaa: 79)*

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, jika bukan mereka sendiri yang mengubahnya”. (Q.S. Ar-rad ayat 11)**



*; **) Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an Cordoba Spesial For Muslimah*. Bandung: PT Cordobra Internasional Indonesia.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifandi Hutomo Fathoni

NIM : 112110101145

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo)* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Desember 2016

Yang menyatakan,

Arifandi Hutomo Fathoni

NIM. 112110101145

SKRIPSI

**KAJIAN FAKTOR KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI, DAN
STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN BENCANA
(Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di
Kecamatan Panti dan Silo)**

Oleh :

Arifandi Hutomo Fathoni
NIM 11211010145

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Christyana Sandra, S. KM., M. Kes.

Dosen Pembimbing Anggota : Eri Witcahyo, S.KM., M.Kes.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo)* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 8 Desember 2016

Tempat : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Isa Ma`rufi, S.KM., M.Kes.

Ninna Rohmawati, S.Gz., MPH.

NIP. 19750914 200812 1 002

NIP. 19840605 200812 2 001

Anggota,

Nanuk Muriyo S, S.E.

NIP. 19631025 199203 1 009

Mengesahkan

Dekan,

Irma Prasetyowati, S. KM., M. Kes.

NIP.19800516 200312 2 002

RINGKASAN

Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti Dan Silo: Arifandi Hutomo Fathoni; 11211010145; 2016; 87 halaman; Bagian Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

Penanganan bencana di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma secara holistik. Penanganan bencana secara holistik lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana serta peningkatan kapasitas masyarakat sebagai upaya preventif. Pemerintah mewujudkan pelaksanaan penanggulangan bencana melalui berbagai kebijakan, salah satunya penerbitan UU Nomor 24 Tahun 2007. Berdasarkan hasil studi pendahuluan didapatkan bahwa di Kabupaten Jember belum terdapat aspek legal kebijakan berupa kebijakan daerah yang khusus mengatur tentang pelaksanaan penanggulangan bencana. Secara garis besar permasalahan BPBD Kabupaten Jember adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan bencana, belum adanya koordinasi yang efektif antar institusi pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan penanggulangan bencana, penanganan bencana yang masih bersifat parsial serta kurangnya anggaran penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada fase prabencana banjir bandang di Kabupaten Jember.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kombinasi *Concurrent Embedded Strategy*, melibatkan seorang informan kunci, lima orang informan utama, dan tiga orang informan tambahan yang ditentukan secara *purposive*. Penelitian dilakukan di beberapa instansi pemerintahan di Kabupaten Jember antara lain Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD); Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Kecamatan Panti dan Silo; Perhutani, menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam kepada informan dengan panduan wawancara, dan data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen. Selanjutnya, data dianalisis secara induktif dengan cara dikategorikan, kemudian diseleksi, direduksi, dan disimpulkan serta dilakukan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan aspek komunikasi dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana termasuk dalam kategori baik. Aspek sumber daya menunjukkan hasil yang bervariasi antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Panti baik, dan Kecamatan Silo cukup. Aspek disposisi termasuk dalam kategori baik. Aspek struktur birokrasi menunjukkan hasil yang bervariasi antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Panti baik, dan Kecamatan Silo cukup.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang belum dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember antara lain BPBD Kabupaten Jember belum melakukan *update* informasi yang dimasukkan ke dalam *website*, dan mengukur efektivitas sosialisasi menggunakan *pretest* dan *posttest*, melibatkan masyarakat dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dalam keanggotaan unsur pengarah, pelatihan/ simulasi sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat Kecamatan Silo dalam menghadapi ancaman banjir bandang, dan pemenuhan sarana prasarana penunjang penanggulangan bencana, mengajukan peraturan daerah yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang secara spesifik berkaitan dengan penanggulangan bencana, belum adanya forum koordinasi antara BPBD, SKPD, dan kecamatan terkait pengurangan risiko bencana, belum terbentuknya desa tangguh bencana khusus banjir bandang di Kecamatan Silo, dan tidak adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) penanggulangan bencana banjir bandang.

SUMMARY

Study of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure Factors toward to The Implementation of Disaster Management Policy (Case Study of The Pre-Disaster Handling in Flash Flood at Panti and Silo Subdistrict; Arifandi Hutomo Fathoni; 112110101145; 2016; 87 pages; Departement of Administration and Health Policy, Public Health Faculty of University of Jember.

The disaster management in Indonesia has undergone paradigm shift; it has become holistic. Disaster management holistically emphasizes more on overall disaster risk management and also community capacity building as a preventive effort. The Government realize the implementation of disaster management through the various policies, one of them is that they issued the Regulation Number 24, 2007. Based on the result of preliminary study, it was obtained that Jember District has no legal aspects of regional policy that specifically regulates the implementation of disaster management. In a big picture, the problem of Regional Disaster Management Agency of Jember District is the lack of public knowledge regarding disaster management, the absence of an effective coordination among government institutions, lack of facilities and infrastructure activities in disaster management, the fact that disaster management is still partial, and lack of disaster management budget. It proves that programmatically organized, integrated, coordinated, and comprehensive disaster management is still not achieved in Jember District. Objective of this study was to assess the implementation of disaster management policy on pre-disaster phase of flash flood in Jember District.

This study was descriptive study with Concurrent Embedded Strategy approach, approach involving a key informant, five main informants, and three additional informants that were determined purposively. The research was conducted in several Government institutions in Jember District, consist of Regional Disaster Management Agency, Health Service, Social Service, Forestry and Plantations, Panti and Silo sub-district, and Forestry Department,

using primary data obtained through in-depth interviews with informants accompanied with interview guide, and secondary data obtained through document study. Furthermore, the data were analyzed inductively by categorizing, then selecting, reducing, concluding, as well as applying triangulation.

Results showed that aspects of communication in connection to the implementation of disaster management policy is involved in good categorization. The aspects of resources show various results between two sub-districts. Panti is good, and Silo is enough. The aspects of disposition is involved in good categorization. The aspects of the bureaucratic structure show varied results between the two sub-districts. Panti is good and Silo is enough.

The Conclusions of this research show that there are some aspects have not been done by The Regional Disaster Management of Jember District, consist of The Regional Disaster Management Agency of Jember District was an update of the information entered into the website, and the measure of the effectiveness of socialization by using pretest and posttest, the community and the associated membership in the local government units in the steering elements, training/simulation as an effort to improve the community's capacity of Silo sub-district to face the threat of the flash flood, and fulfillment infrastructure supporting disaster management are also involved, the inquiry to local regulations passed by the Government of Jember District specifically related to disaster management, the lack of coordination forum among The Regional Disaster Management Agencies, Local Government Unit and sub-district related disaster risk reduction, the absence of the formation of the tough village especially when it comes to Flash flood disaster in Silo sub-district, and the absence Standard Operational Procedure of Flash flood disaster management are also involved.

PRAKATA

Puji Syukur kehadirat kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo* sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan Program Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Christyana Sandra, S.KM., M.Kes. Selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Eri Witcahyo, S.KM., M.Kes. Selaku Dosen Pembimbing Anggota sekaligus Ketua Bagian Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Irma Prasetyowati, S. KM., M. Kes, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
2. Bapak Eri Witcahyo, S. KM., M. Kes, selaku dosen pembimbing akademik yang setiap semester selalu memberikan motivasi kepada saya.
3. Bapak Dr. Isa Ma`rufi, S.KM., M.Kes, selaku ketua penguji skripsi
4. Ibu Ninna Rohmawati, S.Gz., M.PH, selaku sekretaris penguji skripsi
5. Bapak Nanuk Muriyo S, S.E, selaku anggota penguji skripsi
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember, Kecamatan Panti

dan Silo, Perhutani KPH Jember yang telah mengizinkan dan membantu saya selama melakukan penelitian.

7. Seluruh dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya kepada saya.
8. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang telah membantu saya selama masa studi.
9. Kedua orang tua saya Drs. Soewasis, M.Pd dan Sunarwati, SE yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, ilmu, dan dukungannya.
10. Saudara kandung saya Ahmad Adam Adhitama dan Devita Ayun Sari.
11. Keluarga kecil saya *AKK Rangers* 2011, terima kasih atas doa, dukungan, canda dan tawa yang telah diberikan.
12. Sahabat terkasih saya Bujank Lapoek Community, Pebolang, Kos Morinawa, D19's *Crew* dan PBL 12 Jatisari, Keluarga Besar UKM Mapakesma, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kehidupan saya selama di perantauan.
13. Rekan- rekan FKM 2011 yang telah menemani dan berjuang bersama untuk menimba ilmu, terima kasih untuk hari-hari berkesan yang telah kalian berikan.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan optimal, namun masih terdapat kekurangan di dalamnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua di masa yang akan datang.

Jember, 8 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY.....	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI.....	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Manfaat.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Kebijakan.....	8
2.2 Implementasi Kebijakan	10
2.2.1 Pelaksana Kebijakan	12

2.2.2 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan George Edward III	13
2.3 Bencana	20
2.3.1 Definisi Bencana	20
2.3.2 Proses Terjadinya Bencana	21
2.3.3 Bencana Banjir	22
2.3.4 Dampak Bencana.....	24
2.4 Penanggulangan Bencana	25
2.4.1 PenanggulanganPrabencana	27
2.4.2 Penanggulangan Saat Tanggap Darurat	30
2.4.3 Penanganan Pascabencana	30
2.5 Kerangka Teori	31
2.6 Kerangka Konsep.....	32
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.3 Penentuan Informan Penelitian.....	36
3.4 Fokus Penelitian	37
3.5 Data dan Sumber Data	41
3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	41
3.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data.....	43
3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data.....	44
3.7.1 Teknik Penyajian Data	44
3.7.2 Teknik Analisis Data.....	44
3.8 Validitas dan Realibilitas Data	45
3.9 Alur Penelitian	47
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Jember	48
4.2 Karakteristik Informan	49

4.2.1 Informan Kunci	49
4.2.2 Informan Utama	50
4.2.3 Informan Tambahan	51
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
4.3.1 Faktor Komunikasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang	52
4.3.2 Faktor Sumber Daya Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang	59
4.3.3 Faktor Disposisi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang	70
4.3.4 Faktor Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang	76
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Fokus Penelitian dan Pengertian	38
4.1 Indikator Penilaian Faktor Komunikasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang.....	53
4.2 Indikator Penilaian Faktor Sumber Daya Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang	59
4.3 Indikator Penilaian Faktor Disposisi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang.....	70
4.4 Indikator Penilaian Faktor Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Bandang.....	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kedekatan Prosedur Analisis dan Tipe Pembuat Kebijakan.....	10
2.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	14
2.3 Proses Terjadinya Bencana	21
2.4 Siklus Penanggulangan Bencana	26
2.5 Kerangka Teori Penelitian	31
2.6 Kerangka Konsep Penelitian.....	32
3.1 Alur Penelitian	47
4.1 Mekanisme Penanggulangan Bencana.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Lembar Persetujuan.....	90
B. Lembar Panduan Wawancara Penelitian	91
C. Lembar Kuesioner Penelitian	107
D. Transkrip Hasil Wawancara Mendalam.....	113
E. Surat Izin Penelitian Perhutani KPH Kabupaten Jember	138
F. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	139
G. Dokumentasi Penelitian	141

DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI

Daftar Singkatan

Bakornas	= Badan Koordinasi Nasional
BNPB	= Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	= Badan Penanggulangan Bencana Daerah
JICA	= <i>Japan International Corporation Agency</i>
PP	= Peraturan Pemerintah
Perka	= Peraturan Kepala
Permendagri	= Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perda	= Peraturan Daerah
Destana	= Desa Tangguh Bencana
IRBI	= Indeks Risiko Bencana Indonesia
DAS	= Daerah Aliran Sungai
RAN PRB	= Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
SOP	= <i>Standard Operating Procedure</i>
ISDR	= <i>International Strategy for Disaster Reduction</i>
UNDRO	= <i>United Nation Disaster Relief Co-ordinator</i>
KPH	= Kesatuan Pengelolaan Hutan

Daftar Notasi

<	= Kurang dari
>	= Lebih dari
%	= Persen
=	= Sama dengan
-	= Sampai dengan
/	= Atau

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi. Kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor (BNPB, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Nurjanah *et al.* (2012:17) bencana terjadi jika ada interaksi dinamis antara ancaman yang muncul, kondisi kerentanan, serta kapasitas.

Peristiwa atau kejadian yang berpotensi menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, dan kerusakan lingkungan disebut sebagai ancaman (Nurjanah *et al.*, 2012:18) namun tidak semua ancaman selalu menjadi bencana. Ancaman menimbulkan bencana apabila manusia berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan ancaman tersebut. Sebaliknya, ancaman tidak menjadi bencana apabila manusia tidak dalam kondisi rentan dan mampu mengatasi akibat yang ditimbulkannya (Nurjanah *et al.*, 2012:19). Kerentanan adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik sosial, ekonomi dan sosial budaya dan lingkungan yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana (Bakornas PB, 2007). Tingkat kerentanan penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya

bencana karena bencana baru akan terjadi bila bahaya terjadi pada kondisi yang rentan (Awotona dalam Harjadi *et al.*, 2007:11).

Penanganan bencana di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma, yakni menjadi holistik. Penanganan bencana secara holistik lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana serta peningkatan kapasitas masyarakat sebagai upaya preventif. Pemerintah mewujudkan pelaksanaan penanggulangan bencana melalui berbagai kebijakan antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

Menindaklanjuti adanya berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait penanggulangan bencana, Pemerintah daerah Jember melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 membentuk lembaga yang khusus menangani bencana yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bagian dua pasal 20, menjelaskan fungsi BPBD sebagai perumus dan penetap kebijakan serta pengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu, terencana dan menyeluruh. BPBD bertanggung jawab untuk melindungi dari dampak bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana (Darsan, 2014:11). Masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak bencana, harus diberdayakan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, sehingga mampu melakukan upaya-upaya penanganan dampak dan pengurangan resiko bencana. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah Daerah Jember, BPBD Kabupaten Jember membentuk tiga Desa Tangguh Bencana (Destana) banjir dan tanah longsor yang tersebar di beberapa

kecamatan di Kabupaten Jember. Tiga desa itu yakni Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk, Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo, Desa Kemiri Kecamatan Panti (BPBD, 2014).

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013, Kabupaten Jember memiliki potensi risiko multi ancaman bencana yang termasuk tinggi di Jawa Timur. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh data rekapitulasi kejadian bencana BPBD Jember tahun 2013, yang menyebutkan bahwa bencana yang sering terjadi di Kabupaten Jember adalah bencana banjir dan tanah longsor. Kecenderungan yang ada di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa wilayah dimana penduduk dan kepemilikan properti terkonsentrasi di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tanggul, DAS Bedadung, DAS Mayang dan DAS Bondoyudo yang terindikasi memiliki resiko tinggi terhadap terjadinya banjir bandang. Kondisi topografi Kabupaten Jember yang curam dengan beberapa wilayah memiliki *slope area* $>40^\circ$ dengan curah hujan yang relatif tinggi di setiap wilayah memungkinkan potensi terjadinya bencana banjir bandang. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, menyebutkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air dan kecepatan yang besar serta disebabkan terbandungnya aliran sungai pada alur sungai. Beberapa kecamatan sebagai kawasan rawan bencana banjir bandang berada di wilayah Kecamatan Jelbuk, Panti, Patrang, Silo, Sukorambi, Sumberbaru, dan Tanggul (BPBD Jember, 2013).

Wilayah Kecamatan Panti pernah mengalami bencana banjir bandang pada 1 Januari 2006 yang mengakibatkan 264 rumah hanyut dan rusak, 98 orang tewas, puluhan luka-luka, ratusan hektar persawahan dan rumah rusak, serta 6 jembatan dan 9 cekdam hancur (Firmansyah, Eds., 2010:14). Berdasarkan data rekapitulasi bencana BPBD Kabupaten Jember tahun 2009 wilayah Kecamatan Silo mengalami bencana banjir yang mengakibatkan 15 rumah rusak berat, 11 rumah terendam lumpur setinggi ± 3 meter, jembatan setinggi 12 meter roboh dan hanyut terbawa air, 0,25 hektar lahan kopi rusak berat. Dampak kejadian bencana banjir bandang menyentuh seluruh bidang, baik ekonomi, sosial-budaya, politik, namun yang paling utama dirasakan adalah bidang kesehatan. Banjir bandang dalam

jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan dan sistem penyediaan air (*Pan American Health Organization, 2006*). Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang berakibat pada buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pembentukan Desa tangguh bencana (Destana) belum dapat memberikan hasil yang signifikan terkait masalah penanggulangan kebencanaan di Kabupaten Jember. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan kepada pihak BPBD Kabupaten Jember diketahui bahwa BPBD Kabupaten Jember yang baru berdiri tahun 2013 masih berusaha mewujudkan *good governance* dalam hal penanggulangan bencana khususnya prabencana. Salah satu poin dalam pelaksanaan *good governance* adalah adanya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana yang diwujudkan dalam pembentukan Destana, namun pembentukan Destana untuk bencana hidrometeorologi yang masih sedikit mengakibatkan kesenjangan terhadap penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Selain itu, hasil studi pendahuluan didapatkan bahwa di Kabupaten Jember belum terdapat aspek legal kebijakan berupa kebijakan daerah yang khusus mengatur tentang pelaksanaan penanggulangan bencana. Kenyataan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemerintah serta wewenang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara tidak langsung dengan tidak adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur penanggulangan bencana maka akan terjadi ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan kegiatan manajemen risiko bencana sehingga akan timbul masalah-masalah sebagaimana dipaparkan oleh Ahmad Rendy Abdullah tentang peran BPBD dalam tahap kesiapsiagaan bencana alam di wilayah Kabupaten Jember (2015) menunjukkan

bahwa secara garis besar permasalahan BPBD Kabupaten Jember adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan bencana, belum adanya koordinasi yang efektif antar institusi pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan penanggulangan bencana, penanganan bencana yang masih bersifat parsial serta kurangnya anggaran penanggulangan bencana. Selain itu, selama terbentuknya BPBD Kabupaten Jember kajian dan rencana kontinjensi dipusatkan pada penanganan bencana Gunung berapi, yang dimaksud adalah Gunung Raung, sedangkan untuk masalah banjir belum ada tentang rencana kontinjensi. Rencana kontinjensi merupakan rencana yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi sumber daya secara maksimal untuk menghadapi suatu bencana (BNPB, 2008: 13). Hal tersebut juga membuktikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh masih belum tercapai di Kabupaten Jember.

Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Sinergitas menjadi poin penting dalam upaya penanggulangan bencana agar hasil yang dicapai dapat mencegah timbulnya korban massal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketahanan nasional.

Menurut Darsan, (2014:12) manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten Jember memang masih belum terlihat secara nyata dari segi hasil dan capaian-capaiannya. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan penanggulangan bencana masih pada upaya tanggap darurat ketika terjadi bencana saja. Padahal paradigma penanggulangan bencana yang bersifat preventif sebagaimana yang terkandung dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) tahun 2005-2015 menitikberatkan pada upaya penanggulangan sebelum terjadinya bencana. Fase penanggulangan prabencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan menjadi bagian yang sangat penting

karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana.

Menurut Safkaur, (2014:23) implementasi kebijakan merupakan persoalan yang penting di Indonesia, pasalnya setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana ribuan triliun rupiah untuk mendanai berbagai program pembangunan. Tetapi, realitas yang ada menunjukkan bahwa implementasi berbagai program tersebut lebih banyak yang gagal dari pada yang berhasil. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun institusi.

Menurut Edward III dalam Winarno (2011: 176), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor tujuan yang telah ditetapkan dan dengan cara apa tujuan tersebut dilaksanakan. Keberhasilan implementasi secara khusus dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk membantu atau bahkan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal untuk merefleksikan kompleksitas faktor tersebut adalah dengan membahas seluruhnya sekaligus melalui perincian keempat faktor tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, serta mengingat pentingnya dampak dari keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada fase prabencana banjir bandang, maka perlu dilakukan suatu penelitian terkait implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir bandang pada fase prabencana di Kecamatan Panti dan Silo, mengingat kedua wilayah tersebut merupakan wilayah rawan bencana banjir bandang dan pernah mengalami kejadian bencana banjir bandang dengan dampak kerusakan yang parah. Penelitian ini bertujuan guna memahami faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sehingga lebih mendekati pada ketercapaian tujuan kebijakan

penanggulangan prabencana khususnya di Kecamatan Panti dan Silo dan Kabupaten Jember pada umumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada fase prabencana banjir bandang di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengkaji faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada fase prabencana banjir bandang di Kabupaten Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengkaji faktor komunikasi terkait implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada fase prabencana banjir bandang di Kabupaten Jember.
2. Mengkaji faktor sumber daya terkait implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada fase prabencana banjir bandang di Kabupaten Jember.
3. Mengkaji faktor disposisi terkait implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada fase prabencana banjir bandang di Kabupaten Jember.
4. Mengkaji faktor struktur birokrasi terkait implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada fase prabencana banjir bandang di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya dalam lingkup Administrasi dan Kebijakan Kesehatan terkait implementasi kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dan instansi terkait lainnya dalam peningkatan kerjasama dan integrasi guna mencapai keberhasilan pelaksanaan Program Penanggulangan Prabencana, serta khususnya dapat meningkatkan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam koordinasi, komando, dan pelaksana penanggulangan prabencana di Kabupaten Jember.

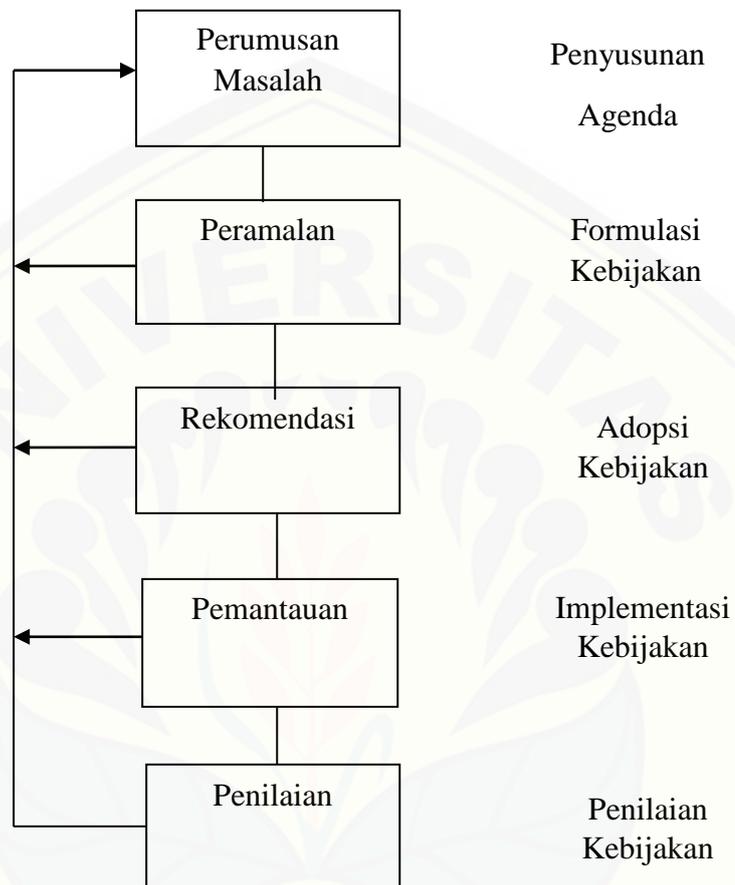
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Kebijakan sering diartikan sebagai sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu (disebut dengan pembuat kebijakan), misalnya bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan atau perdagangan. Kebijakan dapat disusun di semua tingkatan, baik pemerintah pusat atau daerah, perusahaan multinasional atau daerah, sekolah atau rumah sakit (Buse, 2005:3). Winarno (2011:19) mendefinisikan kebijakan sebagai arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Nugroho (2012:127) menyebutkan bahwa kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang berbeda adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik. Sebagai salah satu komponen utama negara, kebijakan publik memiliki beragam bentuk seperti konstitusi, peraturan perundangan, keputusan kebijakan, dan termasuk di dalamnya adalah sebagai “Tata Kelola Negara”.

Dunn (2000:22) menjelaskan bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan.

Berikut bagan penjelasan kedekatan prosedur analisis dan tipe pembuatan kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn



Gambar 2.1 Kedekatan Prosedur Analisis Dan Tipe Pembuat Kebijakan (Dunn, 2000:22)

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan

Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Nugroho, 2012: 139).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Wahab (1997: 64-65), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program

dan menumbuhkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. Implementasi juga menyangkut jaringan-jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terikat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2.2.1. Pelaksana Kebijakan

Perwujudan pembangunan kesehatan sebagai komitmen global merupakan kewajiban Pemerintah Pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota, melalui upaya terpadu yang terkoordinasi dengan baik. Peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, guna mencegah tumpang tindih. Komitmen regional provinsi serta kabupaten dan kota, ditujukan untuk melaksanakan program-program penanggulangan masalah kesehatan yang spesifik dan menonjol di provinsi serta Kabupaten dan Kota tersebut. Implementasi program memerlukan upaya yang sistematis dan terus menerus dari pihak-pihak yang berperan sebagai agen pembaharu (*agent of change*). Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan segenap potensi yang ada, misalnya saja tokoh masyarakat, tokoh agama, atau lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang ada (Sutarto, 2008:34). Nugroho (2012:706) secara jelas menyatakan pelaku dalam implementasi kebijakan senantiasa diawali dari aktor negara atau pemerintah sebagai agensi eksekutif. Meski begitu, pada dasarnya implementasi kebijakan senantiasa dilakukan oleh dua aktor secara bersamaan, karena kebijakan publik menyangkut kepentingan dari aktor yang sama, yaitu *state* dan *society*. Winarno (2011:221) mengelompokkan pelaku kebijakan yang berperan dalam implementasi kebijakan menjadi lima kelompok, antara lain :

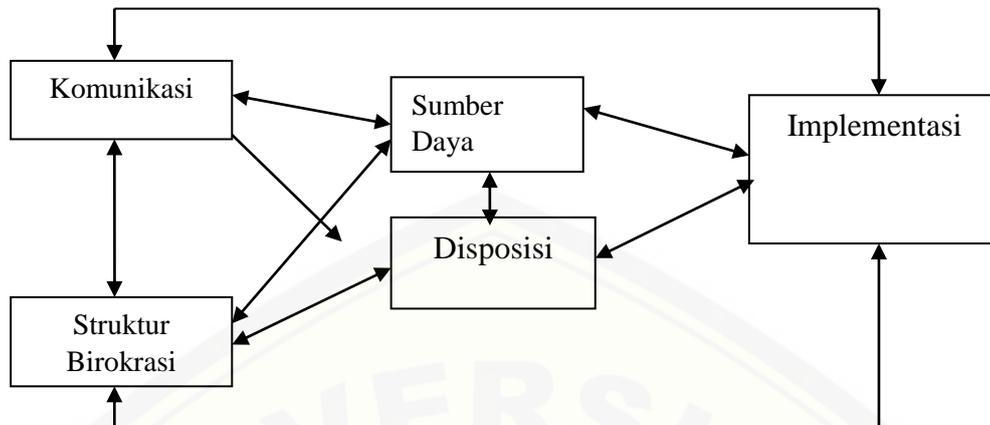
- a. Birokrasi Secara umum, kebijakan publik diimplementasikan terutama oleh sistem badan-badan administrasi yang kompleks. Badan-badan

administrasi ini melakukan tugas pemerintah sehari-hari, dan dengan demikian memengaruhi warga negara secara lebih langsung dalam tindakan. Badan administrasi merupakan aktor-aktor utama dalam implementasi kebijakan publik.

- b. Lembaga Legislatif Tata kelola kebijakan berkaitan dengan implementasi keputusan yang dibuat oleh lebih banyak cabang politik, dan ditangani oleh berbagai badan administratif. Saat ini, semakin meningkat keterlibatan badan-badan legislatif dalam implementasi berkaitan dengan merancang undang-undang yang sangat spesifik ketika berkaitan dengan implementasi.
- c. Lembaga Peradilan Keterlibatan lembaga peradilan adalah dalam konteks memengaruhi tata kelola/ administrasi melalui interpretasi nyata terhadap perundang-undangan dan peraturan-peraturan administratif dan regulasi, dan pengkajian ulang terhadap keputusan administrasi dalam kasus yang dibawa ke pengadilan. Lembaga peradilan bisa memfasilitasi, menghambat, atau secara luas mementahkan implementasi kebijakan-kebijakan tertentu melalui keputusan yang telah ditetapkan lembaga itu.
- d. Kelompok Penekan Kelompok penekan merupakan sebuah kelompok yang berhasil memengaruhi tindakan suatu badan administrasi sehingga memungkinkan mempunyai efek secara substansial pada arah dan dampak dari kebijakan publik.
- e. Organisasi Masyarakat Organisasi masyarakat seringkali terlibat dalam implementasi program-program publik pada tingkat lokal.

2.2.2. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan George Edward III

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III (1984) yang dikutip oleh Winarno (2011:174), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.



Gambar 2.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan (Edward III, 1984 dalam Winarno, 2011: 208)

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting karena *stakeholder* harus mengetahui apa yang akan dikerjakan. Hal ini berkaitan dengan mentransmisi informasi tentang proses implementasi dengan baik kepada *target groups* dengan kejelasan dan konsistensi *stakeholder* dalam hasil proses informasi tentang implementasi kebijakan. Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah kebijakan, yaitu: a. pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan; b. informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi; dan c. pelaksana mempunyai *suudzon* terhadap persyaratan-persyaratan suatu kebijakan karena pentransmisiian suatu kebijakan yang tidak menyeluruh.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus

diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Ada enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut antara lain: kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan. Petunjuk-petunjuk kebijakan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika petunjuk-petunjuk kebijakan dinyatakan dengan jelas sehingga para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung tidak efektif.

Komunikasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit karena komunikasi adalah penyampaian informasi kebijakan antara pembuat kebijakan dan para pelaksana kebijakan, yang mana pesan tersebut bisa disimpangkan dan disebarluaskan melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak. Lebih daripada itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap kebijakan yang akan disampaikan, maka akan memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para implementor akan menghadapi kesulitan yang besar untuk melakukan maksud-maksud kebijakan.

b. Sumber daya

Dalam menyelesaikan permasalahan kebencanaan tentunya diperlukan keterlibatan beberapa instansi dalam implementasi kebijakan, hal ini dapat menimbulkan masalah apabila tidak diikuti dengan tindakan-tindakan yang bisa menjamin bahwa aktifitas yang dilakukan memang mengarah pada tujuan

yang sama. Tindakan komunikasi bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dengan dilibatkannya berbagai pihak berkepentingan adalah koordinasi.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan terdiri dari sumber daya manusia berdasarkan kuantitas dan kualitas yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, sumber daya anggaran, serta fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. Bagaimanapun bagusnya kebijakan namun jika tidak didukung sumber daya yang mencukupi akan sulit untuk diimplementasikan karena keberhasilan pelaksanaan program kebijakan sangat ditentukan dengan sumber daya yang ada serta pengoptimalan sumber daya tersebut.

Edward III menjelaskan lagi dari sumber yang tak kalah pentingnya adalah dana/ anggaran. Faktor dana/ anggaran dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kritis sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan atau fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Dalam kebijakan terkait dengan manajemen bencana, koordinasi antara *staff* yang baik maupun keahliannya sangat dibutuhkan karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara keahlian teknis atau nonteknis merupakan pendukung utama agar para pelaksana mampu melaksanakan tupoksi dengan efisien sesuai tingkat kewenangan agar meminimalisir kelemahan yang dapat mengakibatkan tumpang tindih tugas.

c. Disposisi

Menurut Edward III Disposisi diartikan sebagai sikap ataupun kecenderungan dari para pelaksana kebijakan yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat memengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri atas pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan; arah respon kebijakan (menerima, menolak, netral); intensitas terhadap kebijakan (Van Mater & Van Horn dalam Widodo, 2010:105).

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Winarno (2011:159-202) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.

- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Winarno, 2011:126-151). Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010: 106) implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Edward III dalam Winarno (2011:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif". Menurut Winarno (2011:150), SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

e. Kinerja

Robbins (dalam Gusti, 2008:40) menyatakan kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kinerja yang telah ditetapkan bersama. Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai cara perseorangan atau kelompok dari suatu organisasi menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas. Kedua definisi kinerja tersebut memperlihatkan bahwa istilah kinerja mengarah kepada dua hal, yaitu proses dan hasil yang dicapai (Gusti, 2008:42).

Pembandingan antara hasil yang direncanakan dan hasil yang sebenarnya akan dicapai perlu untuk diukur. Hal ini diperlukan untuk memastikan kegiatan yang direncanakan telah mencapai sasarannya atau tidak. Pengukuran kinerja harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja. Panduan yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat dilakukan adalah pengukuran kinerja atas dasar indikator output yang dapat dilakukan setiap tahun untuk mengukur efektifitas pencapaiannya (Gusti, 2008:15).

2.3 Bencana

2.3.1 Definisi Bencana

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan, lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena (Argadiredja, 2001). Menurut *International Strategy for Disaster Reduction* (UN- ISDR-2002:24) dalam Nurjanah *et al*, 2012: 10) mendefinisikan bencana dalam formulasi “*The serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material or environmental losses, which exceed the ability of the affected communities to cope using their own resources*”.

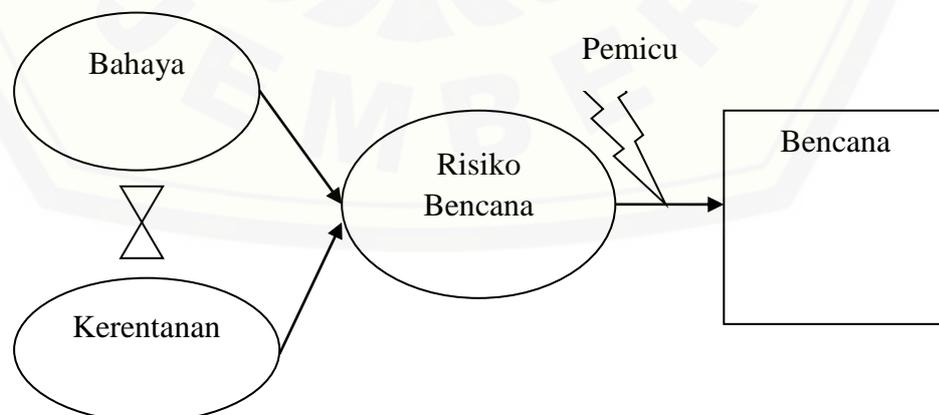
Peristiwa atau serangkaian peristiwa sebagaimana didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 dapat dijelaskan bahwa peristiwa bisa bersifat tunggal (peristiwa/ fenomena alam) dalam waktu hampir bersamaan.

Contoh peristiwa adalah gempa tektonik, apabila gempa tektonik tersebut diikuti oleh tsunami maka hal ini disebut sebagai serangkaian peristiwa. Berdasarkan definisi bencana dari UN-ISDR sebagaimana disebutkan di atas, dapat digeneralisasi bahwa untuk dapat disebut bencana harus memenuhi beberapa kriteria atau kondisi sebagai berikut:

- a. Ada peristiwa;
- b. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia;
- c. Terjadi secara tiba-tiba tetapi dapat juga terjadi secara perlahan;
- d. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain;
- e. Berada di luar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.

2.3.2 Proses Terjadinya Bencana

Peristiwa yang ditimbulkan oleh gejala alam maupun yang diakibatkan oleh kegiatan manusia dapat dikategorikan sebagai bencana apabila masyarakat tidak mampu untuk menanggulangnya. Ancaman alam tidak selalu berakhir dengan bencana. Ancaman alam menjadi bencana ketika manusia tidak siap untuk menghadapi dan pada akhirnya terkena dampak. Kerentanan manusia terhadap gejala alam sebagian besar ditentukan oleh tindakan manusia atau kegagalan manusia untuk bertindak. Jika dicermati, terjadinya bencana adalah karena adanya pertemuan antara bahaya dan kerentanan, serta ada pemicunya.



Gambar 2.3 Proses Terjadinya Bencana (Nurjanah, *et al.*, 2012:14)

Melalui proses tersebut diketahui bahwa bencana terjadi setelah proses dan memenuhi unsur-unsur atau kriteria. Pertama, adanya unsur bahaya (curah hujan tinggi), kedua adanya unsur kerentanan. Kerentanan lebih menekankan aspek manusia di tingkat komunitas yang langsung berhadapan dengan ancaman sehingga kerentanan menjadi faktor utama dalam suatu tatanan sosial yang memiliki risiko bencana lebih tinggi apabila tidak didukung oleh kemampuan seperti kurangnya pengetahuan, kemiskinan, kondisi sosial, dan kelompok rentan yang meliputi lansia, balita, ibu hamil, serta orang dengan cacat fisik dan mental.

Dalam manajemen bencana, risiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. Dalam hal ini, bahaya menunjukkan kemungkinan terjadinya bencana baik alam maupun buatan di suatu tempat. Ketidakmampuan merupakan kelangkaan upaya atau kegiatan untuk mengurangi korban jiwa atau dampak kerusakan sehingga semakin tinggi bahaya, kerentanan dan ketidakmampuan maka akan semakin memperbesar risiko bencana yang dihadapi.

2.3.3 Bencana Banjir

Menurut Bakornas PB (2007:17), ada dua pengertian mengenai banjir, yaitu:

- a. Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan lebih rendah di sisi sungai. Aliran air limpasan tersebut semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air.
- b. Gelombang banjir berjalan kearah hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air di muara akibat badai.

Mujiyono (dalam Darsan, 2014:57) mengklasifikasikan banjir menurut lokasinya, yaitu banjir yang terjadi di daratan dan di lautan. Jenis-jenis banjir tersebut dirinci sebagai berikut:

a. Banjir Sungai

Jika daya tampung air suatu sungai sudah tidak memadai dan air sungai tersebut meluap ke daerah sekitarnya, maka terjadilah banjir. Banjir seperti ini lazim disebut sebagai banjir sungai. Fakta menunjukkan bahwa banjir penyebab banjir diantaranya:

1. Curah hujan yang tinggi sehingga volume air hujan melebihi daya tampung sungai.
2. Menurunnya daya serap tanah karena akibat banyaknya bangunan di perkotaan, penggundulan hutan di wilayah hulu, pembukaan lahan untuk perkebunan dan persawahan, dan sebagainya.
3. Menurunnya daya tampung sungai karena pendangkalan palung sungai.
4. Kondisi alam seperti struktur tanah maupun kondisi kemiringan tanah yang rawan terjadinya longsor.

b. Banjir Genangan

Banjir genangan merupakan bencana banjir yang rutin terjadi di Indonesia akibat ulah manusia. Banjir genangan sering terjadi di wilayah kota-kota besar. Penyebab banjir genangan antara lain:

1. Sistem drainase yang kurang diperhatikan bagi pengusaha hotel, Mall, dan supermarket.
2. Pembuangan sampah yang tidak terkendali mengakibatkan tersumbatnya aliran sungai maupun selokan.
3. Akibat betonasi dan plesterisasi, sehingga tanah tidak mampu menyerap air akibat intensitas hujan maupun banjir kiriman dan wilayah hulu.

c. Banjir Bandang

Banjir bandang yang terjadi biasanya membawa material sedimen dalam volume yang besar dapat merusak benda apapun yang dilaluinya seperti: rumah, infrastruktur, persawahan, Dam, irigasi, dan sebagainya. Peristiwa banjir bandang pada umumnya disebabkan oleh air sungai yang meluap ke

lingkungan sekitarnya sehingga akibat kombinasi kemiringan lahan, curah hujan yang tinggi, penggundulan hutan, dan lain-lain. Ciri-ciri banjir bandang Menurut kajian *National Weather Service Retrieved*, banjir bandang pada umumnya disebabkan oleh karena hujan lebat yang diikuti oleh *storm* atau melelehnya es dan dapat juga disebabkan oleh setelah adanya *collaps* dari suatu dam oleh es atau debris. Banjir bandang dibedakan dengan banjir pada umumnya oleh kecepatan arus air yang tinggi, waktu genangan yang relative cepat hilang yaitu kurang dari enam jam, viskositas aliran tinggi, tinggi genangan air antara 3-6 meter, mampu membawa material lumpur, kerikil batu dan pepohonan.

Faktor Penyebab Banjir Bandang antara lain:

- a. Terbentuknya bendung pada bagian hulu, baik bendung alami maupun manusia,
- b. Hujan deras dengan intensitas tinggi serta durasi waktu yang cukup lama,
- c. Geometri daerah aliran sungai yang menunjang antara bagian hulu dan hilir,
- d. Pohon di hutan ditebang habis sehingga tidak ada tanaman akar yang menahan dan menyerap arus air,
- e. Membuang sampah disembarangan tempat sehingga menyebabkan penyumbatan pada saluran air,
- f. Pendirian bangunan liar disekitar sungai, sehingga mengakibatkan penyempitan dan pendangkalan permukaan sungai.

2.3.4 Dampak Bencana

Dampak bencana adalah akibat yang ditimbulkan dari kejadian bencana. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur, gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan dampak lainnya yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Besaran dampak bencana juga dapat dipengaruhi oleh waktu datangnya kejadian bencana yang datangnya secara tiba-tiba (*sudden-on-set disaster*) dan bencana yang terjadi secara perlahan (*slow-on-set disaster*).

UNDRO (*The United Nation Disaster Relief Co-ordinator*) (1992) dalam (Nurjanah, *et al.*, 2012: 33) mengemukakan, bencana secara serius dapat mengganggu inisiatif-inisiatif pembangunan dalam beberapa cara termasuk a. hilangnya sumber-sumber daya, b. gangguan terhadap program-program, c. pengaruh pada iklim investasi, d. pengaruh pada sektor non-formal, dan e. desabilitas politik. Benson and Clay dalam (Nurjanah, *et al.*, 2012: 35) membagi dampak bencana menjadi tiga bagian, yakni:

- a. Dampak langsung (*direct impact*), meliputi kerugian finansial dari kerusakan asset ekonomi, misalnya kerusakan bangunan seperti tempat tinggal, tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian, dan lain-lain, yang dalam istilah ekonomi disebut *stock value*.
- b. Dampak tidak langsung (*indirect impact*) meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan, yang dalam istilah ekonomi disebut *flow value*.
- c. Dampak sekunder (*secondary impact*) atau dampak lanjutan. Contoh: terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit neraca perdagangan, meningkatnya angka kemiskinan, dan lain-lain.

2.4 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana meliputi pencegahan, mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan (Depkes, 2005). Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa asas-asas penanggulangan bencana, yaitu kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada ayat (2) digambarkan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan

keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskrimatif dan nonproletisi.

Indonesia telah mengadopsi dan mengembangkan paradigma pengurangan risiko sejak 2005, sesuai dengan hasil *World Conference on Disaster Reduction* di Kobe, Jepang. Konferensi tingkat dunia ini menghasilkan beberapa substansi dasar dalam mengurangi kerugian akibat bencana dan diturunkan menjadi sebuah paradigma baru, yaitu paradigam pengurangan risiko. Secara singkat, paradigam ini memiliki tiga hal penting, antara lain:

- a. Penanggulangan bencana berfokus pada keseluruhan manajemen risiko.
- b. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah.
- c. Penanggulangan bencana bukan hanya lagi urusan pemerintah tetapi juga menjadi urusan bersama masyarakat dan lembaga usaha, dimana pemerintah menjadi penanggungjawab utamanya (PH Bakornas PB, 2007:7).

Adapun yang menjadi tujuan dari penanggulangan bencana Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Pasal 4 yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan Penanggulangan bencana berbeda disetiap bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa kegiatan penanggulangan bencana dapat dibedakan atas waktu terjadinya antara lain saat prabencana, saat tanggap darurat, dan saat pascabencana. Upaya tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dalam lingkup “siklus

penanggulangan bencana” (*disaster management cycle*) seperti gambar 2.4 berikut:



Gambar 2.4 Siklus Penanggulangan Bencana (Sumber Depkes, 2007)

2.4.1 Penanggulangan Prabencana

Menurut Nurjanah *et al.* (2012: 47) kegiatan penanggulangan bencana pada fase sebelum terjadi bencana terdiri atas situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana.

Situasi tidak ada potensi bencana adalah kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata. Pada situasi ini perlu adanya kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Hal tersebut meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

b. Pengurangan Risiko Bencana

Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak ada potensi

bencana, yang meliputi pengenalan dan pemantauan risiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, dan penerapan upaya fisik, nonfisik, serta pengaturan penanggulangan bencana.

c. Pencegahan

Pencegahan merupakan langkah-langkah/ kegiatan yang dilakukan untuk mencegah bencana atau risiko yang mungkin terjadi melalui pengendalian dan pengubah-sesuaian fisik dan lingkungan. Hal ini meliputi identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman, kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/ atau berpotensi menjadi sumber bahaya bencana, pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/ atau berpotensi menjadi sumber bahaya bencana, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.

d. Pemaduan ke dalam Perencanaan Pembangunan

Pemanduan ke dalam perencanaan pembangunan dilakukan melalui pencantuman unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

e. Persyaratan Analisis Risiko Bencana

Analisis risiko bencana adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana, dan pemenuhan syarat analisis risiko bencana ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh yang berkompeten.

f. Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar. Secara berkala harus dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

g. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka menyiapkan masyarakat menghadapi bencana untuk mengurangi jatuhnya korban akibat bencana, maka dalam kurikulum pendidikan formal perlu diakomodasikan materi tentang kebencanaan atau penanggulangan bencana khususnya masa kedaruratan bencana, termasuk melakukan pelatihan dalam menghadapi kedaruratan bencana bagi masyarakat yang berada dalam wilayah yang rawan bencana.

h. Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana termasuk masyarakat.

Beberapa kegiatan dilaksanakan pada situasi terdapat potensi bencana antara lain kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi.

a. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kegiatan kesiapsiagaan meletakkan aturan-aturan penanggulangan kedaruratan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih efektif, termasuk kegiatan penyusunan dan uji coba rencana kontijensi, mengorganisasi, memasang, dan menguji sistem peringatan dini, logistik kebutuhan dasar, pelatihan, dan prosedur tetap lainnya.

b. Peringatan dini

Peringatan dini merupakan serangkaian proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis serta disemenasi informasi tentang keberadaan bahaya dan/ atau peningkatan keadaan bahaya. Peringatan dini digunakan untuk mengantisipasi eskalasi bahaya, mengembangkan strategi

tanggapan atau respon pengambilan keputusan terhadap kemungkinan akan segera terjadi bencana. Tujuannya adalah untuk menurunkan kualitas dan kuantitas jumlah korban bencana melalui peningkatan aksesibilitas informasi. Peringatan didasarkan pada informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah atau diterima dari pihak berwenang mengenai kemungkinan akan datangnya suatu bencana (Nurjanah *et al.*, 2012: 53).

c. Mitigasi Bencana

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi meliputi upaya-upaya peraturan dan pengaturan, pemberian sanksi dan penghargaan untuk mendorong perilaku yang tepat, upaya-upaya penyuluhan serta penyediaan informasi untuk memberikan kesadaran dan pengertian kepada manusia terhadap usaha untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Mitigasi bencana meliputi mitigasi struktural misalnya membuat cekdam, bendungan, tanggul sungai, dan lain-lain. Mitigasi nonstruktural misalnya membuat peraturan tata ruang, pelatihan, dan lain-lain (Nurjanah *et al.*, 2012: 54).

2.4.2 Penanggulangan Saat Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana prasarana (Ramli, 2011: 35).

Menurut PP No. 11, langkah-langkah yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat antara lain:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya sehingga dapat diketahui dan diperkirakan *magnitude* bencana, luas area yang terkena dan perkiraan tingkat kerusakannya;

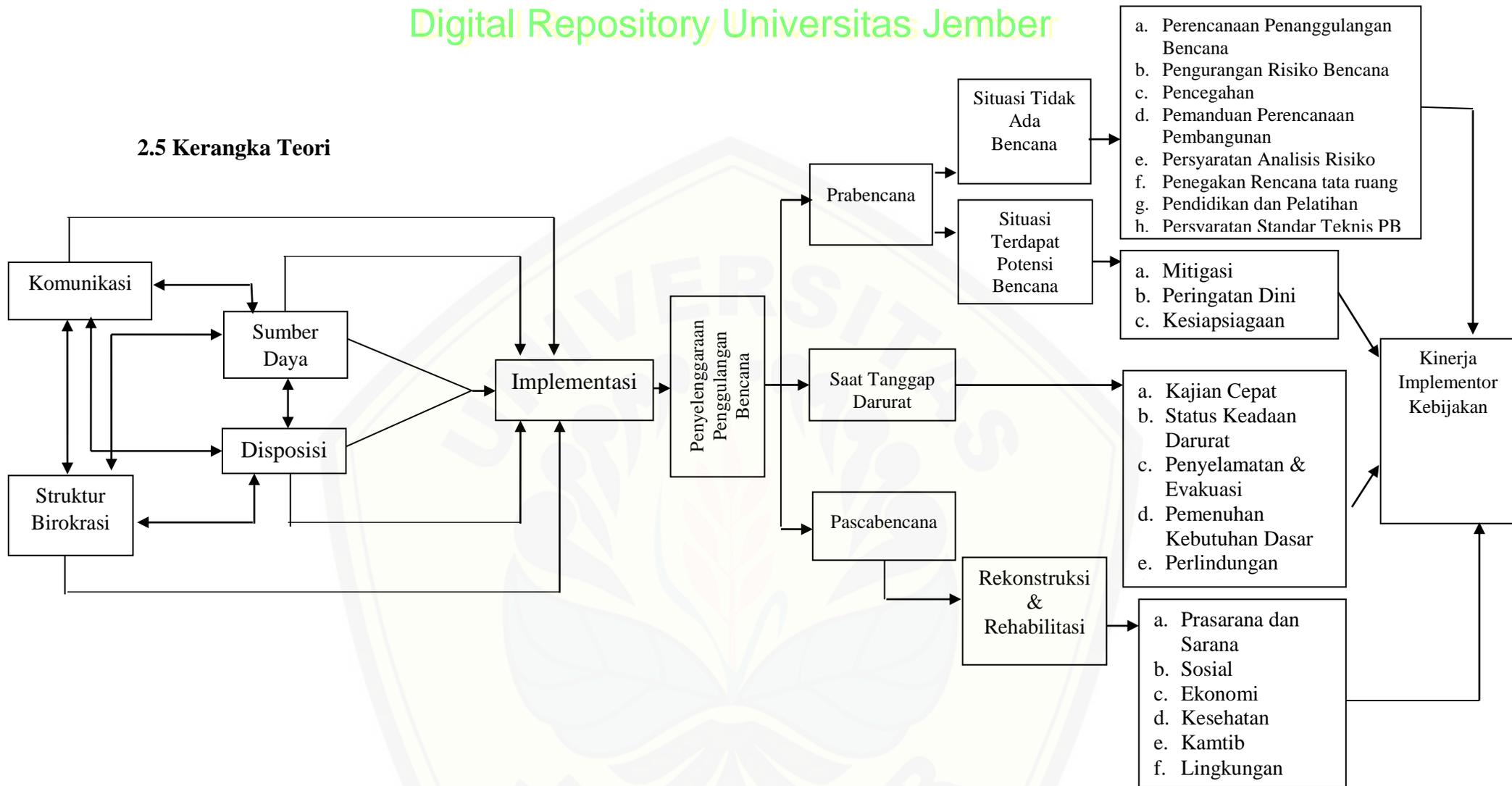
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. Berdasarkan penilaian awal dapat diperkirakan tingkat bencana sehingga dapat pula ditentukan status keadaan darurat. Jika tingkat bencana sangat besar dan berdampak luas, mungkin bencana tersebut dapat digolongkan sebagai bencana nasional;
- d. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.

2.4.3 Penanganan Pascabencana

Pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali pascabencana dan menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya yang dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PERKA) Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Kegiatan pemulihan dilaksanakan sejak proses penilaian kerusakan dan kerugian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengawasannya yang didukung pendanaan yang memadai.

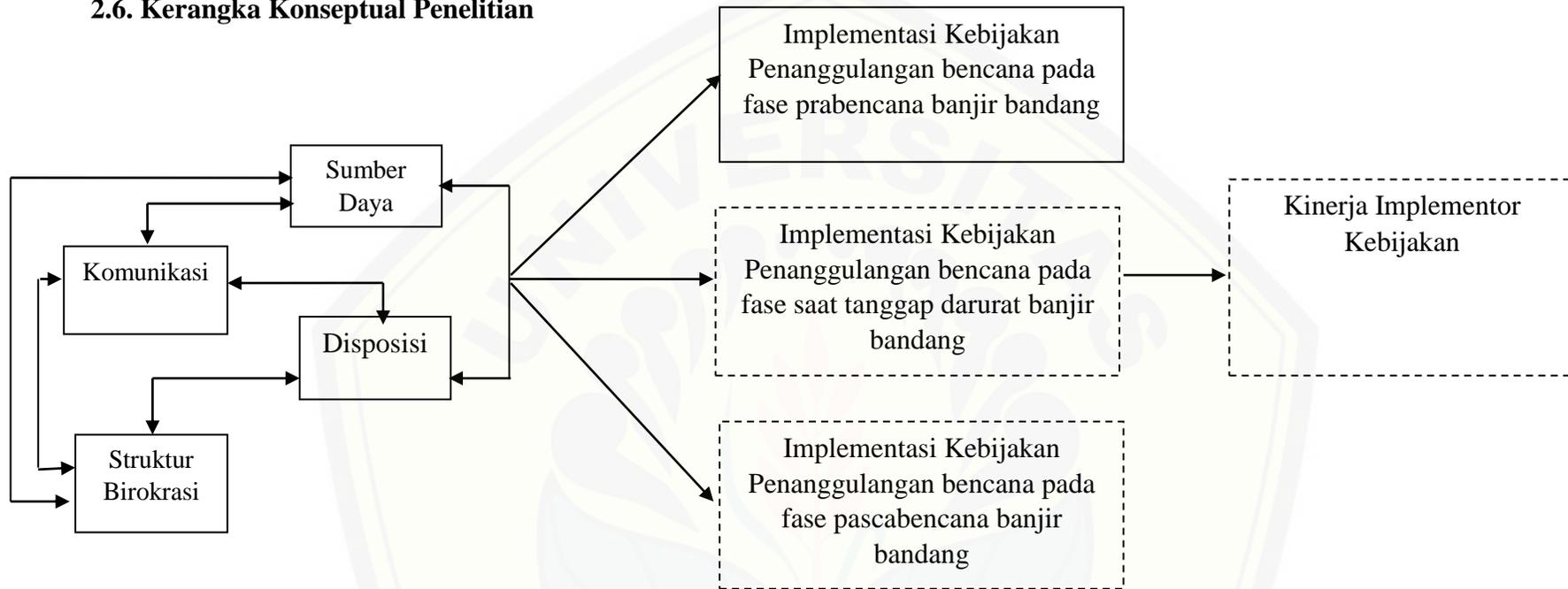
2.5 Kerangka Teori



Gambar 2.3 Kerangka Teori Penelitian

Sumber: Modifikasi Teori Proses Implementasi Kebijakan Edward III 1984(dalam Winarno, 2011), Donald Meter dan Carl Van Horn, dan UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2.6. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Sumber: Modifikasi Teori Proses Implementasi Kebijakan Edward III 1984 (dalam Winarno, 2011), Donald Meter dan Carl Van Horn, 1975 (dalam Nugraha, 2012), dan UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Komunikasi; dimaksudkan adalah kebijakan penanggulangan bencana dalam fase prabencana yang harus diimplementasikan, melalui penyaluran informasi kepada orang-orang yang tepat dan komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten. Kejelasan dan konsistensi komunikasi menghendaki agar kebijakan penanggulangan bencana yang ditransformasikan kepada implementor, *target group* (kelompok sasaran) dan pihak lain yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut dapat diterima dengan jelas, sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan penanggulangan bencana yang dibuat. *Resources* atau sumberdaya mempunyai peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya implementasi kebijakan tersebut tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya fasilitas, *financial*/ anggaran. Tanpa sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif.

Disposisi atau sikap, dimaksudkan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh keinginan atau tekad para pelaksana dalam menerapkan kebijakan atau yang biasa disebut sebagai motivasi. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat memengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri atas pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan; arah respon kebijakan (menerima, menolak, netral); intensitas terhadap kebijakan (Van Mater & Van Horn dalam Widodo, 2010:105).

Struktur birokrasi (organisasi pelaksana kebijakan) dimaksudkan adalah implementasi melibatkan banyak pihak, sehingga koordinasi dan kerjasama dari masing-masing pihak menjadi lebih penting. Dalam hubungan ini, setiap pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan perlu mengembangkan suatu *standard operating procedure (SOP)* yang disepakati bersama. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik dapat mempengaruhi

interpretasi terhadap masalah dan mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2014:118). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi model campuran, merupakan prosedur penelitian di mana peneliti menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh analisis yang komprehensif guna menjawab masalah penelitian (Creswell (2009) dalam Sugiyono, 2014:483). Metode kombinasi yang digunakan adalah metode *Concurrent Embedded Strategy* (campuran tidak berimbang), yakni peneliti mengumpulkan dua macam data (kuantitatif dan kualitatif) dalam satu tahap pengumpulan data (Sugiyono, 2014:617). Metode kombinasi *Concurrent Embedded Strategy* yang digunakan lebih menekankan pada pendekatan kualitatif yang digunakan secara simultan dengan metode kuantitatif mengarah pada teoritis induktif yang digunakan ketika bagian tertentu dari suatu fenomena dapat diukur (Tashakkori dan Teddlie, 2010a:181).

Fenomena yang diteliti dengan pendekatan kualitatif dapat dilakukan dengan mengamati secara langsung, melakukan wawancara dengan individu yang memiliki banyak informasi tentang fenomena yang diteliti, dan mempelajari berbagi dokumen tentang fenomena yang diteliti tanpa mengadakan perhitungan statistik (Afiyanti dan Rachmawati, 2014:6). Sedangkan fenomena yang diteliti dengan pendekatan kuantitatif dapat diukur dan hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan deskripsi atau interpretasi kualitatif (Tashakkori dan Teddlie, 2010a:181). Data penelitian yang telah terkumpul dengan teknik pengumpulan data kualitatif dan data kuantitatif selanjutnya dianalisis untuk digabungkan sehingga dapat ditemukan data kuantitatif mana yang memperkuat, memperluas, dan meningkatkan akurasi data kualitatif (Sugiyono, 2014:621).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir di Kabupaten Jember dilakukan di wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dinas Sosial Kabupaten Jember, Perhutani dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kecamatan Panti, Kecamatan Silo Kabupaten Jember, dan dilakukan sejak Mei 2016- Oktober 2016.

3.3 Penentuan Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2007:108). Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. Teknik *Purposive* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut antara lain, subjek tersebut dianggap orang yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2013:54). Informan penelitian meliputi informan utama, kunci, dan tambahan. Rancangan informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Informan Kunci adalah orang yang dikategorikan paling banyak mengetahui informasi atau data tentang informasi penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Jember.
- b. Informan Utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah 1) Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Rujukan dan Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2) Kepala Bidang Perlindungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember, 3) Kasi Kesehatan Korban Bencana dan Sumbangan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Jember, 4) Kasi Trantib Kecamatan Panti, 5) Kasi Trantib Kecamatan Panti.

- c. Informan Tambahan adalah Informan tambahan adalah mereka yang memberikan informasi walaupun mungkin tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan tambahannya adalah 1) Tokoh Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti, 2) Desa Pace Kecamatan Silo, 3) Kaur Humas Perum Perhutani

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Bungin, 2003:41). Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pikir yang *empirical* induktif, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Adapun fokus penelitian dan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Fokus Penelitian dan Pengertian

No	Fokus Penelitian	Pengertian	Teknik dan Instrumen Pengambilan Data	Informan
1	2	3	4	5
1.	Komunikasi	<p>Penyampaian informasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana kebijakan melalui sosialisasi secara kontinyu agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai harapan, yang terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> Transmisi informasi Kejelasan informasi Konsistensi informasi 	<ol style="list-style-type: none"> Wawancara mendalam (panduan wawancara) Wawancara dengan kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif. <p>Komunikasi responden diukur dengan 18 pertanyaan dengan menggunakan skala <i>guttman</i> sehingga diperoleh skor:</p> <ol style="list-style-type: none"> Skor maksimal $1 \times 18 = 18$ Skor minimal $0 \times 18 = 0$ <p>Pengkategorian</p> <ol style="list-style-type: none"> Baik dengan persentase 67%-100% Cukup dengan persentase 34%-66% Kurang dengan persentase 0%-33%. <p>c. Dokumentasi (<i>recorder</i>).</p>	Wawancara mendalam melibatkan informan kunci, informan utama, informan tambahan

1	2	3	4	5
2.	Sumber Daya	<p>Faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap keefektifan pelaksanaan kebijakan, terdiri dari:</p> <p>a. Sumber daya manusia berdasarkan kualitas dan kuantitas yang tersedia guna melaksanakan dan mendukung pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Prabencana.</p> <p>b. Sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana.</p> <p>c. Sumber daya fasilitas yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana.</p>	<p>a. Wawancara mendalam (panduan wawancara)</p> <p>b. Wawancara dengan kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif.</p> <p>Sumber daya diukur dengan 17 pertanyaan dengan menggunakan skala <i>guttman</i>, sehingga diperoleh skor:</p> <p>a. Skor maksimal $1 \times 17 = 17$</p> <p>b. Skor minimal $0 \times 17 = 0$</p> <p>Pengkategorian</p> <p>a. Baik dengan persentase 67%-100%</p> <p>b. Cukup dengan persentase 34%-66%</p> <p>c. Kurang dengan persentase 0%-33%.</p> <p>c. Dokumentasi (<i>recorder</i>)</p>	<p>Wawancara mendalam melibatkan informan kunci, informan utama, informan tambahan</p>

1	2	3	4	5
3	Disposisi/ Tendensi Sikap	Sikap ataupun kecenderungan dari para pelaksana kebijakan yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif meliputi keinginan dan komitmen dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan prabencana yang kemudian dipengaruhi oleh pemberian penghargaan berupa insentif kepada pelaksana kebijakan penanggulangan prabencana banjir bandang.	<p>a. Wawancara mendalam (panduan wawancara)</p> <p>b. Wawancara dengan kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif. Disposisi/ tendensi sikap diukur dengan 7 pertanyaan dengan menggunakan skala <i>guttman</i> sehingga diperoleh skor:</p> <p>a. Skor maksimal $1 \times 7 = 7$</p> <p>b. Skor minimal $0 \times 7 = 0$</p> <p>Pengkategorian</p> <p>a. Baik dengan persentase 67%-100%</p> <p>b. Cukup dengan persentase 34%-66%</p> <p>c. Kurang dengan persentase 0%-33%.</p> <p>c. Dokumentasi (<i>recorder</i>)</p>	Wawancara mendalam melibatkan informan kunci, informan utama, informan tambahan
4.	Struktur Birokrasi	Organisasi yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan Penanggulangan Prabencana, baik itu struktur pemerintah, masyarakat ataupun pihak swasta yang didukung oleh aspek-aspek antara lain: adanya <i>Standart Operasional Procedure (SOP)</i> , pembagian tugas pokok dan fungsi, forum diskusi sebagai wadah koordinasi antar pelaksana kebijakan.	<p>a. Wawancara mendalam (panduan wawancara)</p> <p>b. Wawancara dengan kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif. Struktur birokrasi diukur dengan 8 pertanyaan dengan menggunakan skala <i>guttman</i> sehingga diperoleh skor:</p> <p>a. Skor maksimal $1 \times 8 = 8$</p> <p>b. Skor minimal $0 \times 8 = 0$</p> <p>Pengkategorian</p> <p>a. Baik dengan persentase 67%-100%</p> <p>b. Cukup dengan persentase 34%-66%</p> <p>c. Kurang dengan persentase 0%-33%.</p> <p>c. Dokumentasi (<i>recorder</i>).</p>	Wawancara mendalam melibatkan informan kunci, informan utama, informan tambahan

3.5 Data dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan huruf atau kata, kalimat atau angka yang dikumpulkan melalui proses pengumpulan data. Data tersebut merupakan sifat atau karakteristik dari sesuatu yang diteliti (Notoatmodjo, 2010:180). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data sumber pertama yang diperoleh dari individu seperti hasil kumpulan wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013:62).

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan dari sumber utama, individu atau perseorangan yang didapatkan melalui angket, wawancara, jajak pendapat, dan lain-lain (Nazir, 2013:50), yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dinas Sosial Kabupaten Jember, Perhutani dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember, Pemerintah kecamatan Panti dan Silo, Tokoh masyarakat di Desa Kemiri Kecamatan Panti dan Desa Pace Kecamatan Silo.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data rekapitulasi bencana banjir Kabupaten Jember, Indeks Risiko Bencana Indonesia, data alokasi anggaran Penanggulangan Prabencana, dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, dokumen Rencana Mitigasi, dokumen Rencana Kontijensi.

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan keberhasilan suatu penelitian

(Nazir, 2005:175). Data pada penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara (Afifuddin, 2009:56). Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data keterangan secara lisan dari seorang subyek penelitian (informan) dengan cara bercakap-cakap dengan informan tersebut (Notoatmodjo, 2010:102). Wawancara dapat pula dilakukan dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara (Nazir, 2005:193). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara kepada informan dengan menggunakan panduan wawancara yang urutan pertanyaannya bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap informan tersebut guna memperoleh data primer. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview* dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan cara pihak yang diajak wawancara diminta mengemukakan pendapat dan ide-idenya terkait hal yang diteliti (Sugiyono, 2011:73).

b. Kuesioner

Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan wawancara (kuesioner) yang digunakan untuk memandu wawancara. Pada penelitian ini kuesioner berisi beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada pihak Kecamatan Panti dan Silo. Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang dipakai dalam wawancara berisi daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik dan sudah matang (Notoatmodjo, 2010:152).

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data berdasarkan pada catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, notulen rapat, dan sebagainya (Arikunto, 2006:135). Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Penggunaan studi dokumentasi dalam penelitian ini didasarkan karena

dokumen dapat memberi informasi yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dan sekaligus merupakan upaya triangulasi. Studi dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan data terkait rekapitulasi bencana banjir bandang di Kabupaten Jember, Indeks Risiko Bencana Indonesia, data kependudukan di BPS Kabupaten Jember, data alokasi anggaran Penanggulangan Prabencana, Rencana Kontijensi.

d. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang ada dan sumber data yang ada. Pengumpulan data dengan triangulasi ini sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data (Sugiyono, 2014:397). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, yaitu menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui metode kualitatif dan kuantitatif dengan membandingkan pernyataan dari informan penelitian dan diambil suatu kesimpulan.

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, akan tetapi selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. (Sugiyono, 2014:374). Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan panduan wawancara (garis-garis besar permasalahan) yang akan digunakan dalam wawancara mendalam dengan dibantu oleh alat perekam suara (*recorder*) yang digunakan adalah *handphone*. Instrumen untuk pengamatan langsung menggunakan kamera *handphone* agar lebih efektif dan efisien.

Dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan wawancara (kuesioner) yang digunakan untuk memandu wawancara. Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang dipakai dalam wawancara berisi daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik dan sudah

matang (Notoatmodjo, 2010:152). Kuesioner dalam penelitian ini mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi (kecenderungan), struktur birokrasi dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

3.7.1. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek (Bungin, 2007:103). Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menginformasikan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pembuatan laporan hasil penelitian agar laporan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat menggambarkan hasil penelitian (Notoatmodjo, 2010:194). Cara penyajian data penelitian dilakukan melalui berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk teks (*textular*) (Afifuddin, 2009:48). Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk teks deskripsi detail sesuai bahasa dan pandangan informan.

Penyajian data dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menginformasikan hasil penelitian. Dalam penelitian ini hasil penelitian disajikan secara verbal, matematis dan grafis. Penyajian verbal adalah penyajian dengan menggunakan kata-kata, penyajian matematis adalah penyajian menggunakan tabel, dan penyajian grafis adalah penyajian menggunakan grafik atau diagram.

3.7.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:404) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya telah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing and verification*.

Untuk pendekatan kuantitatif menggunakan model analisis deksriptif kuantitatif. Kegiatan mengolah data menurut Narkubo dan Achmadi (2002) dalam Ari Setiawan dan Saryono (2010, p.127) yaitu: a) *Editing* (pemeriksaan) adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan responden. Tujuannya untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di daftar pertanyaan (kuesioner). b) *Scoring* adalah memberikan penilaian terhadap item-item yang perlu diberi penilaian atau skor. 1 untuk nilai benar dan skor 0 untuk nilai salah. c) *Coding* (pengkodean) Mengklasifikasikan jawaban dari para responden ke dalam kategori antara lain:

1. Baik, dengan persentase 67%-100%
2. Cukup dengan persentase 34%-66%
3. Kurang, dengan prosentase 0%-33%,

d) *Tabulating* (tabulasi) *Tabulating* adalah membuat tabel dari jawaban-jawaban yang telah diberi kode kemudian dimasukkan ke dalam tabel.

3.8 Validitas dan Reliabilitas Data

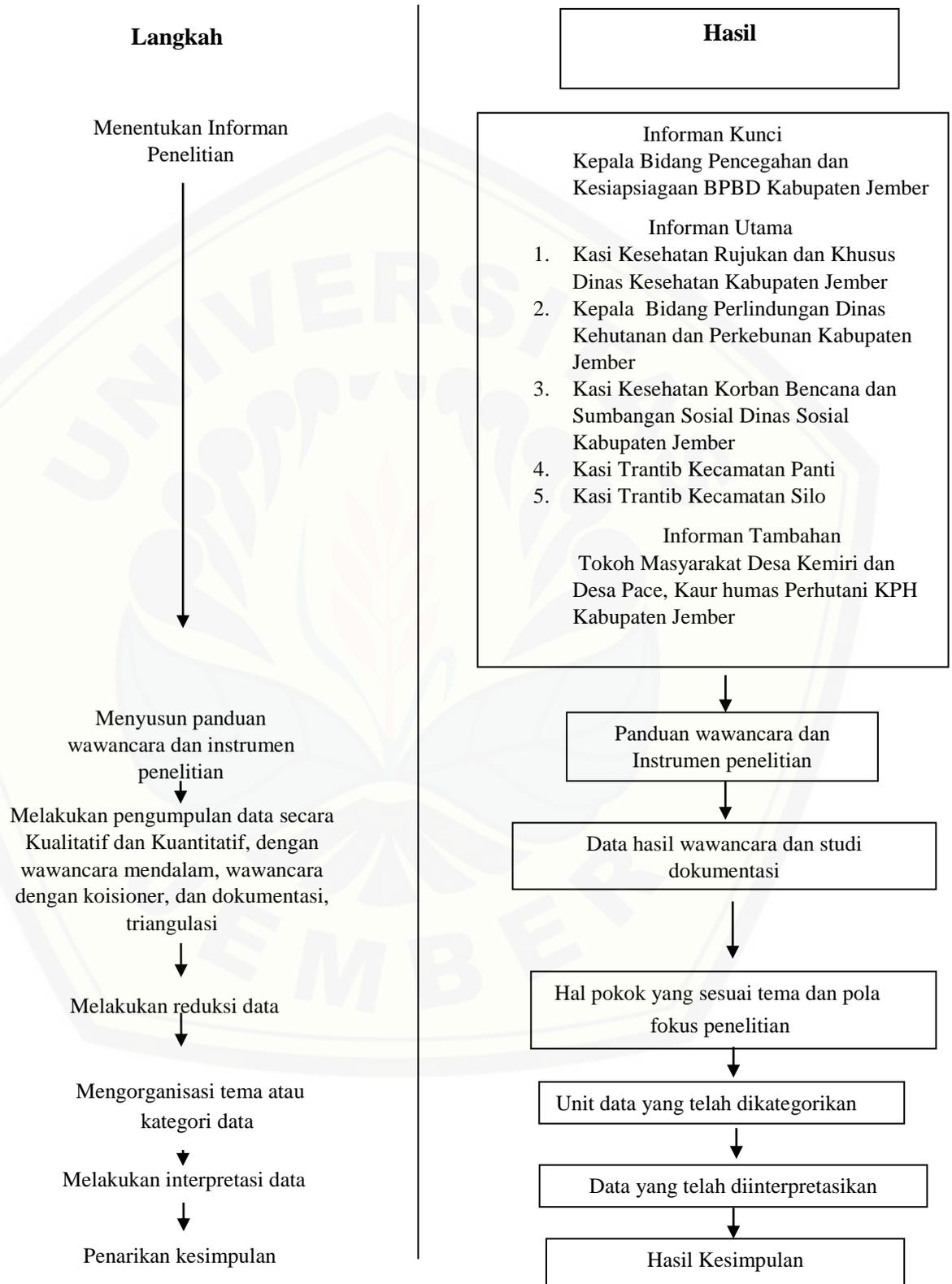
Validitas dalam metode kualitatif lebih dikenal dengan istilah "autentisitas", yaitu memberikan deskripsi, keterangan, informasi yang adil dan jujur. Sedangkan, reliabilitas menunjuk pada tingkat konsistensi, baik jika dibanding dengan penelitian oleh peneliti berbeda atau tempat berbeda. Memvalidasi hasil penelitian berarti menentukan akurasi dan kredibilitas hasil melalui strategi yang tepat. Salah satunya menggunakan strategi triangulasi, yaitu menggunakan bermacam-macam data dan menggunakan lebih dari satu teori serta teknik analisa (Raco, 2008:138).

Triangulasi digunakan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian (Moleong,

2004:164). Menurut Sugiyono (2014:397), triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dapat dibedakan menjadi tiga macam triangulasi yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan teknik, yaitu menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui metode kualitatif dan kuantitatif.



3.9 Alur Penelitian



Gambar 3.1 Alur Penelitian

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kajian faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur biokrasi terhadap implementasi kebijakan penanggulangan bencana (studi kasus tentang penanganan prabencana banjir bandang di Kecamatan Panti dan Silo), maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- a. Secara umum aspek komunikasi dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana antara Kecamatan Panti dan Silo adalah baik. Aspek yang belum dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember adalah *update* informasi yang dimasukkan ke dalam *website*, dan mengukur efektivitas sosialisasi menggunakan *pretest* dan *posttest*.
- b. Secara umum aspek sumber daya dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana bervariasi yaitu Kecamatan Panti baik, dan Kecamatan Silo cukup. Bervariasinya persentase antara dua kecamatan tersebut, dikarenakan masih terdapat beberapa aspek yang belum dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember, antara lain melibatkan masyarakat dan SKPD terkait dalam keanggotaan unsur pengarah, pelatihan/ simulasi sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat Kecamatan Silo dalam menghadapi ancaman banjir bandang, dan pemenuhan sarana prasarana penunjang penanggulangan bencana.
- c. Secara umum aspek disposisi dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana adalah baik. Aspek yang belum dipenuhi antara lain belum adanya peraturan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang secara spesifik berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- d. Secara umum aspek struktur birokrasi dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana bervariasi yaitu Kecamatan Panti baik, dan Kecamatan Silo cukup. Bervariasinya persentase antara dua kecamatan tersebut,

dikarenakan masih terdapat beberapa aspek yang belum dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember, antara lain tidak adanya forum koordinasi antara BPBD, SKPD, dan kecamatan terkait pengurangan risiko bencana, belum terbentuknya desa tangguh bencana khusus banjir bandang di Kecamatan Silo, dan tidak adanya SOP penanggulangan bencana banjir bandang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diberikan saran-saran dengan harapan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi implementasi kebijakan penanggulangan bencana khususnya pada fase prabencana banjir bandang, antara lain:

- a. BPBD Kabupaten Jember perlu meningkatkan sosialisasi tidak langsung dengan melakukan *update* informasi yang ada di *website* resmi secara berkala meliputi data kajian kebencanaan, data korban dan kerugian, daftar relawan kebencanaan.
- b. BPBD Kabupaten Jember perlu melaksanakan evaluasi dalam bentuk *pretest* dan *posttest* pada saat melaksanakan sosialisasi terkait implementasi kebijakan penanggulangan bencana, sehingga tingkat kejelasan informasi/ efektivitas dari sosialisasi kebijakan penanggulangan bencana dapat terukur dengan baik.
- c. BPBD Kabupaten Jember beserta SKPD terkait dan Masyarakat perlu mengadvokasi pembentukan keanggotaan unsur pengarah sehingga mampu memberikan rekomendasi mengenai kebijakan atau program-program yang dapat mendukung kegiatan penanggulangan bencana dengan lebih cepat dan tanggap; membentuk forum koordinasi pengurangan risiko bencana antara BPBD, SKPD, dan kecamatan sehingga tercipta optimalisasi kinerja dalam penanggulangan khususnya pada fase prabencana; serta memperbanyak pembentukan dan pendampingan desa tangguh bencana yang dilakukan secara maksimal guna

memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi ancaman bencana di daerah mereka.

- d. Perlunya *stakeholder* berkoordinasi untuk melakukan advokasi peningkatan dana pendampingan penanggulangan bencana terutama pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang relatif lebih kecil dibandingkan bidang lainnya serta perlu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sebagai salah satu indikator kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana banjir bandang.
- e. Perlu dilakukan advokasi oleh *stakeholder* terkait rancangan peraturan daerah yang khusus mengatur tentang penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan kapasitas Kabupaten Jember, serta perlu mendorong diterbitkannya SOP berupa rencana kontinjensi khusus banjir bandang sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana bisa terlaksana dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. R. 2015. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Tahap Kesiapsiagaan Bencana Alam Di Wilayah Kabupaten Jember. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Afifuddin & Soebari. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Afiyanti, Y. I. & Rachmawati, I. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Riset Keperawatan Ed.1*. Jakarta : Rajawali Press.
- Argadiredja, D.S. 2001. *Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana di Lapangan*. Jakarta : Depkes RI.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012a. *Perka BNPB No. 02 Tahun 2012, tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana*, Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2012b. *Perka BNPB No. 01 Tahun 2012, tentang Pedoman Umum Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana*, Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jember, 2014. *Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kab. Jember Tahun 2013*. Jember, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jember.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jember, 2014. *Profil Institusi BPBD Kabupaten Jember*. Jember, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jember.
- Bakornas Penanggulangan Bencana. 2007. *Pedoman Penanggulangan Banjir Tahun 2007-2008*. Jakarta.
- BNPB. 2008. *Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana*. Jakarta: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- BNPB. 2013. *IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia)*. Citeureup-Sentul: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis, dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Buse, K., Mays, N., Walt, G. 2005. *Making Health Policy*. New York: Open University Press
- Darsan. 2014. Manajemen Bencana Sebagai Kebijakan Publik (Studi Kasus Tentang Kampung Siaga Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Jember. Tidak Diterbitkan. *Disertasi*. Jember: Universitas Jember.
- Ditjen Binkesmas Depkes, 2005. Pedoman Puskesmas Dalam Penanggulangan Bencana, Jakarta.
- Dunn, W. N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, C, George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington. D.C : Congressional Quarterly Press
- Firmansyah, M, N., 2010. Penyelidikan Potensi Bencana Banjir Bandang Di Kabupaten Jember Jawa Timur. Tidak Diterbitkan. *Buletin Vulkanologi dan Bencana Geologi*. Jawa Timur: PVMBG.
- Gaffar, A. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gusti. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Harjadi, Ratag, Karnawati, Seis, Surono, Sutardi, Triwibowo, Sigit, Wasiati, Yusharmen, Pariatmono, Triutomo, dan Widjaja. 2007. *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasi Di Indonesia Edisi Ke II*, Jakarta: BAKORNAS PB.
- Jamaika, A, B. 2015. Implementasi Kebijakan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kabupaten Bondowoso. Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.
- Kuncoro, D. & Husein, R. 2015. Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Alam Di Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Diterbitkan. *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Murdani, A. 2011. Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 1999 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukit Tinggi Dan Kabupaten Agam (Kasus: Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam). Tidak Diterbitkan. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nugroho, R. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo.
- Nurjanah, Sugiharto, R, Kuswanda, Dede, B.P, Siswanto, Adikoesoemo,. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- PAN *American Health Organization*, 2006. *Bencana Alam. Perlindungan Kesehatan Masyarakat* (alih bahasa Munaya Fauziah). Jakarta: EGC.
- Paramita, W. 2012. Analisis Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur. Tidak Diterbitkan. *Tesis*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7. 2012. *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember*.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3. 2008. *Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48. 2008. *Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21. 2008. *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*.
- Pristiyanto, D. 2013. Forum PRB: Mitra Penting Upaya Pengurangan Risiko Bencana. [Serial online]. [http://www.academia.edu/24826988/Forum PRB Mitra Penting Upaya Pengurangan_Risiko_Bencana](http://www.academia.edu/24826988/Forum_PRB_Mitra_Penting_Upaya_Pengurangan_Risiko_Bencana). [7 November 2016].
- Puspitasari, N., E., A., 2014. Penataan Birokrasi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. Tidak Diterbitkan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Ramli, S. 2011. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ruky, A.S. 2006. *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Safkaur, L. T. 2014. Implementasi Kebijakan Publik: Review Teori. [Serial Online]. <http://ejurnal-fisipuncen.org/index.php/jis/article/viewFile/24/10>. [11 Januari 2016].

- Sembiring, K. 2007. *Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Bencana di Indonesia*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Setiawan, A., Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian kebidanan*. Jakarta: Nuha Medika.
- Sirait J.T., 2006. *Memahami Aspek –Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta : Grasindo.
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, E. 2008. *Pengantar Menuju Reformasi Pembangunan Kesehatan di Kabupaten dan Kota*. Bogor: Penerbit Sajogyo Institute.
- Syarif, A. 2014. Analisis Pentingnya Komunikasi Dan Informasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kota Makassar. Tidak Diterbitkan. *Tesis*. Makasar: Universitas Hasanudin.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. 2010. *Handbook of Mixed Methods In Social and Behavioral Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-undang Nomor 24. 2007. *Penanggulangan Bencana*.
- Umar, H. 2005. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, A. S. 1997. *Evaluasi kebijakan Publik*. Malang: FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Widodo, J. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. 2011. *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Yustika, A. E. 2012. *Perekonomian Indonesia: Catatan Dari Luar Pagar*. Malang: Bayumedia Publishing.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Jl. Kalimantan I/93 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 337878

Fax. (0331) 322995 Jember 68121

LEMBAR PERSETUJUAN
INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Umur :

Menyatakan bersedia menjadi subjek penelitian (informan) dalam penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : Arifandi Hutomo Fathoni
NIM : 112110101145
Judul : Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo)

Prosedur penelitian ini tidak akan memberikan dampak dan risiko apapun pada subjek penelitian, karena semata-mata untuk kepentingan ilmiah, serta kerahasiaan jawaban yang saya berikan dijamin sepenuhnya oleh peneliti. Saya telah diberikan penjelasan mengenai hal tersebut di atas dan saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti dan telah mendapatkan jawaban yang jelas dan benar.

Dengan ini saya menyatakan secara sukarela untuk ikut sebagai subjek dalam penelitian ini dan saya bersedia menjawab semua pertanyaan dengan sejujur-jujurnya.

Jember,2016

Responden



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jl. Kalimantan I/93 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 337878

Fax. (0331) 322995 Jember 68121

**A. Lembar Panduan Wawancara untuk Informan Kunci (BPBD
Kabupaten Jember**

Judul : Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo)

Panduan Wawancara :

- a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
 - b. Mohon jawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.
-

A. Komunikasi

1. Bagaimana bentuk sosialisasi penyelenggaraan penanggulangan prabencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember baik kepada SKPD, Kecamatan maupun masyarakat? Secara langsung dan tidak langsung?
2. Bagaimana intensitas sosialisasi kebijakan penanggulangan prabencana yang dilakukan? Terjadwal dengan baik atau tidak?
3. Bagaimana efektifitas sosialisasi kebijakan penanggulangan prabencana yang dilakukan?
4. Bagaimana partisipasi SKPD dan masyarakat dalam sosialisasi?
5. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan sosialisasi tersebut? Jika ada, apa hambatannya?

B. Disposisi/ Tendensi sikap

1. Bagaimana pendapat anda terkait Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember? Efektif menunjang kinerja?
2. Apakah kebijakan daerah terkait penanggulangan bencana telah ditetapkan dan disinergikan dengan kebijakan lainnya seperti tata guna lahan, IMB, dll)?
3. Bagaimana wujud komitmen anda terkait implementasi Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana ke depan? (advokasi kebijakan)
4. Apakah ada semacam pemberian *reward* and *punishment* sebagai bentuk motivasi terhadap pelaksana terkait pelaksanaan Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember?

C. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana wujud pembagian tupoksi terkait Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang? (pembentukan unit-unit khusus penanganan bencana)
2. Bagaimana pendapat anda terkait Tupoksi antara BPBD, SKPD, dan kecamatan dalam pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir? Sudah sinergi atau terjadi *overlapping*?
3. Apakah ada forum khusus yang mempertemukan Anda dengan pelaksana Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir lainnya guna membahas terkait implementasi kebijakan tersebut dan pengembangannya? Bagaimana pelaksanaannya? (intensitas dan penjadwalan)
4. Bagaimana efektifitas SOP Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang?
5. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten jember terhadap SKPD dan kecamatan dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember?
6. Bagaimana intensitas koordinasi yang dilaksanakan BPBD?
7. Apa hambatan yang dialami BPBD Kabupaten jember dalam melakukan koordinasi terkait implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember?

B. Lembar Panduan Wawancara untuk Informan Utama (Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)

Judul : Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo)

Panduan Wawancara :

- a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
 - b. Mohon jawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.
-

A. Komunikasi

1. Bagaimana bentuk sosialisasi yang didapatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terkait penanggulangan prabencana? Secara langsung dan tidak langsung?
2. Intensitas sosialisasi kebijakan penanggulangan prabencana yang dilakukan? Terjadwal dengan baik atau tidak?
3. Bagaimana pendapat anda terkait sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember?
4. Terkait sosialisasi yang telah dilakukan, apa saran yang dapat anda berikan?

B. Sumber Daya

1. Bagaimana Peran Sumber Daya Manusia yang dihimpun dari berbagai SKPD, kecamatan, dan masyarakat (unsur pengarah)?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan peningkatkan kompetensi pelaksana terkait implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang? Terjadwal atau tidak?
3. Apakah Dinas Kesehatan pernah mengajukan usulan alokasi anggaran terkait penyelenggaraan prabencana Banjir Bandang kepada BPBD Kabupaten Jember?
4. Bagaimana mekanisme pengajuan anggaran tersebut?
5. Berapa alokasi anggaran yang didapatkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Jember? Sudah idealkah alokasi anggaran tersebut?
6. Bagaimana Pengelolaan anggaran tersebut? sudah efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas?
7. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang?

C. Disposisi/ Tendensi sikap

1. Bagaimana pendapat anda terkait Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember? Efektif menunjang kinerja?
2. Bagaimana wujud komitmen anda terkait implementasi Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana ke depan? (advokasi kebijakan)
3. Apakah ada semacam pemberian *reward* and *punishment* sebagai bentuk motivasi terhadap pelaksana terkait pelaksanaan Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember?

D. Struktur Birokrasi

1. Apa tupoksi yang didapat Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terkait Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang dari BPBD Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pendapat anda terkait Tupoksi yang telah terima? Sudah sinergi atau terjadi *overlapping*?
3. Apakah ada forum khusus yang mempertemukan Anda dengan pelaksana Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir lainnya guna membahas terkait implementasi kebijakan tersebut dan pengembangannya? Bagaimana pelaksanaannya?
4. Bagaimana efektifitas SOP Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang?
5. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten jember terhadap SKPD dan kecamatan dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember?
6. Bagaimana intensitas koordinasi yang dilaksanakan BPBD?
7. Apa hambatan yang dialami Dinas Kesehatan Kabupaten jember dalam melakukan koordinasi terkait implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember?
8. Bagaimana pendapat anda terkait koordinasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember?

C. Lembar Panduan Wawancara untuk Informan Utama (Perhutani KPH Kabupaten Jember)

Judul : Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo)

Panduan Wawancara :

- a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
 - b. Mohon jawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.
-

A. Komunikasi

1. Bagaimana bentuk sosialisasi yang didapatkan Perhutani KPH Kabupaten Jember terkait penanggulangan prabencana? Secara langsung dan tidak langsung?
2. Intensitas sosialisasi kebijakan penanggulangan prabencana yang dilakukan? Terjadwal dengan baik atau tidak?
3. Bagaimana pendapat anda terkait sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember?
4. Terkait sosialisasi yang telah dilakukan, apa saran yang dapat anda berikan?

B. Sumber Daya

1. Bagaimana Peran Sumber Daya Manusia yang dihimpun dari berbagai SKPD, kecamatan, dan masyarakat (unsur pengarah)?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan peningkatkan kompetensi pelaksana terkait implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang? Terjadwal atau tidak?
3. Apakah Perhutani KPH Kabupaten Jember pernah mengajukan usulan alokasi anggaran terkait penyelenggaraan prabencana Banjir Bandang kepada BPBD Kabupaten Jember?
4. Bagaimana mekanisme pengajuan anggaran tersebut?
5. Berapa alokasi anggaran yang didapatkan oleh Perhutani KPH Kabupaten Jember? Sudah idealkah alokasi anggaran tersebut?
6. Bagaimana Pengelolaan anggaran tersebut? sudah efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas?

7. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang?



C. Disposisi/ Tendensi sikap

1. Bagaimana pendapat anda terkait Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember? Efektif menunjang kinerja?
2. Bagaimana wujud komitmen anda terkait implementasi Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana ke depan? (advokasi kebijakan)
3. Apakah ada semacam pemberian *reward* and *punishment* sebagai bentuk motivasi terhadap pelaksana terkait pelaksanaan Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember?

D. Struktur Birokrasi

1. Apa tupoksi yang didapat Perhutani KPH Kabupaten Jember terkait Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang dari BPBD Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pendapat anda terkait Tupoksi yang telah terima? Sudah sinergi atau terjadi *overlapping*?
3. Apakah ada forum khusus yang mempertemukan Anda dengan pelaksana Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir lainnya guna membahas terkait implementasi kebijakan tersebut dan pengembangannya? Bagaimana pelaksanaannya?
4. Bagaimana efektifitas SOP Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang?
5. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten jember terhadap SKPD dan kecamatan dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember?
6. Bagaimana intensitas koordinasi yang dilaksanakan BPBD?
7. Apa hambatan yang dialami Perhutani KPH Kabupaten Jember dalam melakukan koordinasi terkait implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember?
8. Bagaimana pendapat anda terkait koordinasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember?

D. Lembar Panduan Wawancara untuk Informan Utama (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jember)

Judul : Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo)

Panduan Wawancara :

- a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
 - b. Mohon jawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.
-

A. Komunikasi

1. Bagaimana bentuk sosialisasi yang didapatkan Dishutbun Kabupaten Jember terkait penanggulangan prabencana? Secara langsung dan tidak langsung?
2. Intensitas sosialisasi kebijakan penanggulangan prabencana yang dilakukan? Terjadwal dengan baik atau tidak?
3. Bagaimana pendapat anda terkait sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember?
4. Terkait sosialisasi yang telah dilakukan, apa saran yang dapat anda berikan?

B. Sumber Daya

1. Bagaimana Peran Sumber Daya Manusia yang dihimpun dari berbagai SKPD, kecamatan, dan masyarakat (unsur pengarah)?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan peningkatkan kompetensi pelaksana terkait implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang? Terjadwal atau tidak?
3. Apakah Dishutbun Kabupaten Jember pernah mengajukan usulan alokasi anggaran terkait penyelenggaraan prabencana Banjir Bandang kepada BPBD Kabupaten Jember?
4. Bagaimana mekanisme pengajuan anggaran tersebut?
5. Berapa alokasi anggaran yang didapatkan oleh Dishutbun Kabupaten Jember? Sudah idealkah alokasi anggaran tersebut?
6. Bagaimana Pengelolaan anggaran tersebut? sudah efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas?

7. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang



C. Disposisi/ Tendensi sikap

1. Bagaimana pendapat anda terkait Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember? Efektif menunjang kinerja?
2. Bagaimana wujud komitmen anda terkait implementasi Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana ke depan? (advokasi kebijakan)
3. Apakah ada semacam pemberian *reward* and *punishment* sebagai bentuk motivasi terhadap pelaksana terkait pelaksanaan Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember?

D. Struktur Birokrasi

1. Apa tupoksi yang didapat Dishutbun Kabupaten Jember terkait Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang dari BPBD Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pendapat anda terkait Tupoksi yang telah terima? Sudah sinergi atau terjadi *overlapping*?
3. Apakah ada forum khusus yang mempertemukan Anda dengan pelaksana Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir lainnya guna membahas terkait implementasi kebijakan tersebut dan pengembangannya? Bagaimana pelaksanaannya?
4. Bagaimana efektifitas SOP Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang?
5. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten jember terhadap SKPD dan kecamatan dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember?
6. Bagaimana intensitas koordinasi yang dilaksanakan BPBD?
7. Apa hambatan yang dialami Dishutbun Kabupaten Jember dalam melakukan koordinasi terkait implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember?
8. Bagaimana pendapat anda terkait koordinasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember?

E. Lembar Panduan Wawancara untuk Informan Utama (Dinsos)

Judul : Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo)

Panduan Wawancara :

- a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
 - b. Mohon jawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.
-

A. Komunikasi

1. Bagaimana bentuk sosialisasi yang didapatkan Dinsos Kabupaten Jember terkait penanggulangan prabencana? Secara langsung dan tidak langsung?
2. Intensitas sosialisasi kebijakan penanggulangan prabencana yang dilakukan? Terjadwal dengan baik atau tidak?
3. Bagaimana pendapat anda terkait sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember?
4. Terkait sosialisasi yang telah dilakukan, apa saran yang dapat anda berikan?

B. Sumber Daya

1. Bagaimana Peran Sumber Daya Manusia yang dihimpun dari berbagai SKPD, kecamatan, dan masyarakat (unsur pengarah)?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan peningkatkan kompetensi pelaksana terkait implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang? Terjadwal atau tidak?
3. Apakah Dinsos Kabupaten Jember pernah mengajukan usulan alokasi anggaran terkait penyelenggaraan prabencana Banjir Bandang kepada BPBD Kabupaten Jember?
4. Bagaimana mekanisme pengajuan anggaran tersebut?
5. Berapa alokasi anggaran yang didapatkan oleh Dinsos Kabupaten Jember? Sudah idealkah alokasi anggaran tersebut?
6. Bagaimana Pengelolaan anggaran tersebut? sudah efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas?
7. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang

C. Disposisi/ Tendensi sikap

1. Bagaimana pendapat anda terkait Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember? Efektif menunjang kinerja?
2. Bagaimana wujud komitmen anda terkait implementasi Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana ke depan? (advokasi kebijakan)
3. Apakah ada semacam pemberian *reward* and *punishment* sebagai bentuk motivasi terhadap pelaksana terkait pelaksanaan Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember?

D. Struktur Birokrasi

1. Apa tupoksi yang didapat Dinsos Kabupaten Jember terkait Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang dari BPBD Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pendapat anda terkait Tupoksi yang telah terima? Sudah sinergi atau terjadi *overlapping*?
3. Apakah ada forum khusus yang mempertemukan Anda dengan pelaksana Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir lainnya guna membahas terkait implementasi kebijakan tersebut dan pengembangannya? Bagaimana pelaksanaannya?
4. Bagaimana efektifitas SOP Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang?
5. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten jember terhadap SKPD dan kecamatan dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember?
6. Bagaimana intensitas koordinasi yang dilaksanakan BPBD?
7. Apa hambatan yang dialami Dinsos Kabupaten Jember dalam melakukan koordinasi terkait implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember?
8. Bagaimana pendapat anda terkait koordinasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember?

F. Lembar Panduan Wawancara untuk Informan Utama (Kecamatan)

Judul : Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo)

Panduan Wawancara :

- a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
 - b. Mohon jawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.
-

A. Komunikasi

1. Bagaimana bentuk sosialisasi yang didapatkan kecamatan terkait penanggulangan prabencana? Secara langsung dan tidak langsung?
2. Intensitas sosialisasi kebijakan penanggulangan prabencana yang dilakukan? Terjadwal dengan baik atau tidak?
3. Bagaimana pendapat anda terkait sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember?
4. Terkait sosialisasi yang telah dilakukan, apa saran yang dapat anda berikan?

B. Sumber Daya

1. Bagaimana Peran Sumber Daya Manusia yang dihimpun dari berbagai SKPD, kecamatan, dan masyarakat (unsur pengarah)?
2. Apakah Kecamatan mendapat kegiatan peningkatan kompetensi terkait DESTANA?
3. Bagaimana pendanaan dalam penyelenggaraan DESTANA?
4. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang

C. Disposisi/ Tendensi sikap

1. Bagaimana pendapat anda terkait Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember? Efektif menunjang kinerja?
2. Bagaimana wujud komitmen anda terkait implementasi Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana ke depan? (advokasi kebijakan)

3. Apakah ada semacam pemberian *reward* and *punishment* sebagai bentuk motivasi terhadap pelaksana terkait pelaksanaan Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember?

D. Struktur Birokrasi

1. Apa tupoksi yang didapat Kecamatan terkait Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang dari BPBD Kabupaten Jember ?
2. Apakah ada forum khusus yang mempertemukan Anda dengan pelaksana Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir lainnya guna membahas terkait implementasi kebijakan tersebut dan pengembangannya? Bagaimana pelaksanaannya?
3. Bagaimana efektifitas SOP Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang?
4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan Kecamatan dengan BPBD Kabupaten Jember, Perhutani, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, TAGANA dan Dinas Kesehatan dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember?
5. Bagaimana intensitas koordinasi yang dilaksanakan BPBD?
6. Bagaimana pendapat anda terkait koordinasi yang telah dilakukan?
7. Terkait koordinasi yang telah dilakukan, apa saran yang dapat anda berikan?

G. Lembar Panduan Wawancara untuk Informan Tambahan (Tokoh Masyarakat)

Judul : Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo)

Panduan Wawancara :

- a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
 - b. Mohon jawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.
-

A. Komunikasi

1. Bagaimana bentuk sosialisasi yang didapatkan masyarakat terkait penanggulangan prabencana? Secara langsung dan tidak langsung?
2. Intensitas sosialisasi kebijakan penanggulangan prabencana yang dilakukan? Terjadwal dengan baik atau tidak?
3. Bagaimana pendapat anda terkait sosialisasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember?
4. Terkait sosialisasi yang telah dilakukan, apa saran yang dapat anda berikan?

B. Sumber Daya

1. Bagaimana Peran Sumber Daya Manusia yang dihimpun dari berbagai SKPD, kecamatan, dan masyarakat (unsur pengarah)?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan peningkatkan kompetensi pelaksana terkait implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang? Terjadwal atau tidak?
3. Apakah masyarakat pernah mengajukan usulan alokasi anggaran terkait penyelenggaraan prabencana Banjir Bandang kepada BPBD Kabupaten Jember?
4. Bagaimana mekanisme pengajuan anggaran tersebut?
5. Berapa alokasi anggaran yang didapatkan oleh masyarakat? Sudah idealkah alokasi anggaran tersebut?

C. Disposisi/ Tendensi sikap

1. Bagaimana pendapat anda terkait Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember? Efektif menunjang kinerja?
2. Bagaimana wujud komitmen anda terkait implementasi Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana ke depan? (advokasi kebijakan)

3. Apakah ada semacam pemberian *reward* and *punishment* sebagai bentuk motivasi terhadap pelaksana terkait pelaksanaan Kebijakan Tentang Penanggulangan Bencana khususnya yang ada di Kabupaten Jember?

C. Struktur Birokrasi

1. Apakah ada forum khusus yang mempertemukan Anda dengan pelaksana Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir lainnya guna membahas terkait implementasi kebijakan tersebut dan pengembangannya? Bagaimana pelaksanaannya?
2. Bagaimana efektifitas SOP Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang?
3. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan Kecamatan dengan BPBD Kabupaten Jember, Perhutani, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, TAGANA dan Dinas Kesehatan dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember?
4. Bagaimana intensitas koordinasi yang dilaksanakan BPBD?
5. Bagaimana pendapat anda terkait koordinasi yang telah dilakukan?
6. Terkait koordinasi yang telah dilakukan, apa saran yang dapat anda berikan?



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jl. Kalimantan I/93 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 337878

Fax. (0331) 322995 Jember 68121

A. Lembar Kuisoiner

Judul : Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo).

Tanggal Wawancara :

Panduan Wawancara :

- a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memilih alternatif pilihan yang telah disediakan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.

A. Komunikasi

1. BPBD melakukan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang kepada SKPD, kecamatan, masyarakat
 - a) Ya, *jika iya lanjut ke nomer 2
 - b) Tidak, *jika tidak lanjut ke poin B
2. Bentuk sosialisasi tidak langsung apa yang telah dilakukan :

No	Bentuk Sosialisasi	Ada	Tidak Ada
a.	Peta daerah rawan bencana		
b.	Pamflet		
c.	Poster		
d.	Web		
e.	Media cetak		
f.	Media elektronik (radio dan televisi)		
g.	Jalur evakuasi		
h.	Lainnya		



3. Model sosialisasi langsung yang dilakukan

No	Bentuk Sosialisasi	Ya	Tidak
a.	Penyuluhan		
b.	Pemicuan		
c.	Lainnya		

4. Materi yang didapat dari sosialisasi :

No	Materi Sosialisasi	Ada	Tidak Ada
a.	Informasi daerah berpotensi bencana		
b.	Sistem peringatan dini		
c.	Mobilisasi sumber daya		
d.	Pendidikan kesiapsiagaan pra bencana		
e.	Mitigasi		
f.	Lainnya		

B. Sumber Daya

1. Sumber daya manusia yang dimiliki kecamatan telah terlibat dalam Kesiapsiagaan Prabencana Banjir Bandang
 - a) Ya
 - b) Tidak
2. Jumlah SDM yang terlibat dalam Kesiapsiagaan Prabencana Banjir Bandang lebih dari 10 orang
 - a) Ya
 - b) Tidak



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jl. Kalimantan I/93 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 337878

Fax. (0331) 322995 Jember 68121

3. Termasuk anggota unsur pengarah
 - a) Ya
 - b) Tidak
4. Ada pelatihan / peningkatan *capacity building* bagi pelaksana kebijakan yang berkaitan dalam penanggulangan Prabencana Banjir Bandang
 - a) Ya, *jika iya, lanjut ke nomor 5
 - b) Tidak, * jika tidak, lanjut ke nomor 7
5. Persentase SDM yang mengikuti pelatihan
 - a) <50%
 - b) ≤50%

6. Pelatihan yang pernah diikuti:

No	Pelatihan	Ya	Tidak
a.	Pelatihan dasar kebencanaan		
b.	pelatihan PPGD		
c.	Simulasi dari pelatihan		
d.	Pelatihan lainnya		

7. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan penanggulangan Prabencana Banjir

APBN	Ya	Tidak
APBD	Ya	Tidak
Donor	Ya	Tidak
Lainnya	Ya	Tidak

8. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang (fasilitas kantor dan lapangan) dalam Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang

HT	Ya	Tidak
Tenda darurat	Ya	Tidak



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jl. Kalimantan I/93 Kampus Tegal Boto Telp. (0331) 337878

Fax. (0331) 322995 Jember 68121

Alat deteksi peringatan dini	Ya	Tidak
Ambulans	Ya	Tidak
Pick up	Ya	Tidak
Sarpras penunjang lain sudah lengkap	Ya	Tidak
Lainnya	Ya	Tidak

C. Disposisi/ Tendensi sikap

1. Terdapat Komitmen (dukungan) terhadap kebijakan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang

- a) Ya
- b) Tidak

2. Terdapat aturan tertulis tentang pengurangan resiko bencana atau penanggulangan bencana di Kabupaten Jember

- a) Ya, *jika iya, lanjut nomor 3
- b) Tidak, *jika tidak, lanjut nomor 4

3. Jenis aturan tertulis yang telah dibuat :

Perda	Ya	Tidak
SK Kadin/ Kaban	Ya	Tidak
Instruksi Kecamatan/ Desa	Ya	Tidak
Surat Edaran	Ya	Tidak
Lainnya	Ya	Tidak

4. Terdapat sistem *reward* dan *punishment* terhadap pelaksanaan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang

- c) Ya
- d) Tidak



D. Struktur Birokrasi

1. BPBD melakukan koordinasi penyelenggaraan Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang kepada kecamatan
 - a) Ya, *jika iya lanjut ke nomer 2
 - b) Tidak, *jika tidak lanjut ke nomer 4
2. Intensitas koordinasi kegiatan prabencana rutin dilakukan
 - a) Ya
 - b) Tidak
3. Bentuk koordinasi apa yang telah dilakukan :

No	Bentuk Koordinasi	Ada	Tidak Ada
a.	Pelaporan data- data penujung proses penanggulangan bencana		
b.	Koordinasi melalui media sosial		
c.	Lainnya		

4. Terdapat forum koordinasi antara BPBD, SKPD, dan Kecamatan terkait pengurangan risiko bencana
 - a) Ya
 - b) Tidak
5. Terdapat destana banjir bandang sebagai wadah koordinasi dengan masyarakat
 - a) Ya
 - b) Tidak
6. Pembagian tupoksi terkait Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang di Kabupaten Jember sudah dilakukan
 - a) Ya,
 - b) Tidak



7. Terdapat SOP tertulis yang digunakan dalam Penanggulangan Prabencana Banjir Bandang
 - a) Ya, *jika iya lanjut ke nomor 6
 - b) Tidak
8. SOP tersebut sudah tersosialisasi
 - a) Ya
 - b) Tidak

Lampiran D. Transkrip Hasil Wawancara Mendalam

1. Informan Kunci

Karakteristik informan:

- a. Nama : MR
- b. Instansi : BPBD Kabupaten Jember
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Peneliti menemui informan di kantor BPBD Kabupaten Jember pada tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 WIB. Sebelumnya, peneliti telah membuat janji temu dengan informan dan menemui informan di ruang kerjanya. Pada saat wawancara dilaksanakan hanya ada peneliti dan informan dalam ruangan kantor.

Hasil Wawancara mendalam

- P: Assalamualaikum Pak, saya Fandi dari FKM Universitas Jember akan mewawancarai *jenengan* sebagai Informan dalam skripsi saya dengan tema implementasi kebijakan penanggulangan prabencana banjir bandang di Kabupaten Jember studi kasus Kecamatan Panti dan Silo yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
- I: Waalaikumsalam, iya mas *monggo*.
- P: Terkait komunikasi dalam implementasi kebijakan sendiri itu ada fase sosialisasinya baik pada masyarakat, instansi terkait, apa itu dilakukan? Dan bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan ?
- I: Ya mas, itu sudah kami lakukan, baik di instansi terkait maupun di masyarakat. Di masyarakat juga kami gunakan semacam *focus group discussion* kalau di kita itu namanya *inisiasi*, jadi setelah kami beri semacam penjelasan terkait kebijakan penanggulangan bencana khususnya prabencana masyarakat juga dipancing-pancing untuk mengeluarkan pendapatnya dengan pengetahuan lokal mereka akan adanya bencana yang mereka ketahui dipadukan dengan teknologi yang kita bawa untuk memastikan. Selain itu sosialisasi tidak langsung bisa dari pengembangan media, peta daerah rawan bencana, jalur evakuasi, poster, dsb.
- P: Untuk pengembangan media pak khususnya *website* dari BPBD sendiri apa senantiasa di *Update*?

- I: *La* untuk masalah *Webside* dari BPBD Kabupaten Jember itu ada mas tapi memang belum update untuk informasinya.
- P: Materi-materi dalam sosialisasi itu apa saja pak?
- I: Ya.., penjelasan tentang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan peringatan dini, daerah rawan, terus bagaimana menghindar dan sikap-sikapnya baik gempa dan bencana lainnya.
- P: Apa selalu ada simulasinya pak setiap materi itu?
- I: Tidak selalu, jadi yang kita pandang perlu ya kita lakukan, dan juga tergantung pengajuan anggaran pada saat itu. Seperti kemarin ada sirine tsunami ya kita lakukan simulasi.
- P: *Ooh* tsunami pak, untuk banjir bandang apa ada juga pak alatnya?
- I: Tidak ada sampai saat ini yang kami ketahui ya alat untuk *EWS* banjir genangan, sistem peringatan dini kita ya dapat informasi dari BMKG terus nanti kita kontrol 3 DAS besar kemungkinan ada *opo* banjir bandang ya kita langsung hubungi ke kades- kades yang rawan untuk wasapada.
- P: Intensitas sosialisasinya bagaimana pak?
- I: Tiap tahun, kita ratakan tiap bulan, *mediamit*, jadi kita juga memanfaatkan media sebagaimana sosialisasi tidak langsung tadi. Ya kalau di masyarakat kita ada yang namanya Destana. Jadi difokuskan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kerentanan.
- P: Untuk destana tadi apa ada penjadwalan dalam pertemuannya?
- I: Sementara kita lakukan skala prioritas daerah rawan dari 11 desa mungkin sudah 9 desa melalui kegiatan sosialisasi, simulasi mandiri. Sebagai contoh Kecamatan Silo khususnya desa Sidomulyo, Kecamatan Sumberjambe khususnya Desa Rowosari itu kita lakukan simulasi menghadapi bencana gunung meletus.
- P: Efektif Pak sosialisasinya?
- I: Sebenarnya menilai efektif dan tidaknya itu menggunakan *pretest* dan *postest* ya.. tapi selama ini belum.. Pokoknya di masyarakat kita beri tahu ini lo bahayanya, dampaknya ya *yokopo mas* kadang juga hal-hal sepele gitu lupa. Jadi apa yang kita lakukan itu nantinya sampai kepada dibuatnya dokumen renkon yaitu semacam SOP, sapa berbuat apa, melakukan apa, proporsinya seberapa semacam tupoksi *lah* itu sudah ada di renkon atau rencana kontijensi.
- P: Partisipasi SKPD dan masyarakat dalam sosialisasi?
- I: Kalau SKPD atau instansi itu biasanya ada perwakilan yang koordinasi dengan kita kalau di masyarakat kita biasanya mengundang perangkat desa, kecamatan, tokoh masyarakat dan juga beberapa masyarakat di daerah rawan.
- P: Hambatan dalam sosialisasi?
- I: Ya gak ada yang serius mungkin kalau di masyarakat ya masalah *timing* aja ketepatan kehadiran aja.. *undangane jam 8 tekone jam 9* terus juga kita juga harus menyesuaikan jadwal mereka kan ada yang *ngaret* cari rumput itu jadi bisanya mungkin setelah magrib atau isya` la waktunya kan pendek banget sedangkkn materi yang mau kita berikan itu banyak makanya pola-pola

sosialisasi dibutuhkan meskipun biayanya lebih mahal. La kebencanaan itu Untuk mensiasati *timing* tadi harusnya mediamit tadi dioptimalkan. Sebenarnya domainnya BNPB teknik perubahan secara meluas tadi dengan teknik-teknik promosi tadi. Selebihnya *se* gak ada mas.

P: Bagaimana peran SDM yang dihimpun dari berbagai SKPD, Kecamatan, dan Masyarakat yang berkaitan dengan unsur pengarah dan unsur pelaksana yang terdiri dari lima pejabat instansi terkait dan empat masyarakat profesional sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang BPBD Kabupaten Jember ?

I: Untuk itu belum dibentuk mas kalau unsur pengarah kalau unsur pelaksana ya sesuai struktur organisasi BPBD Kabupaten Jember.

P: Bagaimana seharusnya kompetensi SDM yang terlibat dalam unsur pengarah dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan prabencana?

I: Kalaupun nanti ada pembentukan ya harus dilihat dari kompetensi mas.. pasti dilihat dari tingkat pendidikan dan juga pengalaman –pengalaman yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan-pelatihan. Di BPBD sendiri, tingkat untuk level pimpinan yang masuk di struktur organisasi itu minimal strata 1 tentunya juga sudah pernah mengikuti pelatihan kebencanaan.

P: Ada pelatihan pak yang diselenggarakan BPBD dan untuk SKPD serta masyarakat?

I: Iya mas ada.

P: Itu pelaksanaannya gimana pak?

I: Yang jelas itu ada pelatihan TRC, kalau gak salah tahun sekarang sebelum puasa.

P: Pesertanya itu dari mana pak?

I: Dari Instansi terkait jadi pemangku kepentingan seperti PU (Bina Marga, Cipta Karya, kemudian Rumah Sakit, Dinkes, Kodim, Polres,

P: Dishutbun *ndak* pak?

I: *Gak apal* aku itu pak Heru

P: Kok malah pak Heru?

I: *Ehmmmm* karna dianggap tim reaksi cepat saat terjadi bencana.

P: Untuk di prabencana sendiri gimana pak?

I: ya ada Pelatihan dasar kebencanaan, DIBI, PPGD, Pelatihan Kebakaran. Selain dari kita juga kan dari propinsi dan pusat juga sering menyelenggarakan. Kalau di masyarakat itu ya bentuknya simulasi kesiapsiagaan menghadapi bencana.

P: Kalau pelatihan DIBI itu yang ikut siapa pak? Apa dinas terkait juga ikut?

I: Saya waktu itu. Semetara karena yang ini itu kita ya kita dulu yang ikut. Itu pelaksanaannya tahun ini di Malang.

P: Yang ikut pelatihan ini *itu –itu* saja apa rata semua diikuti?

I: Kalau sifatnya kontinyu itu kita tetapkan orang tapi kalau tidak ya kita buat gentian. Terus mas..

P: Penjadwalan khusus pelatihan apa ada?

- I: Kalau saya meskipun tidak terdaksional karena bagian dari kewajiban kita mengemban amanah undang-undang itu kita komparasikan dengan kemampuan anggaran kita.maka kebijakan itu kemudian diambil oleh Kepala Badan dengan DPRD mana yang disetujui. Kalau mainstream perencanaan itu sudah jelas kita punya jadwal tapi dilaksanakan atau tidak itu terserah Kepala Badan kecuali saya yang memprioritaskan itu beda lagi.
- P: Pengajuan anggaran BPBD itu gimana pak?
- I: Itu ada tim anggaran, tim anggaran itu diketuai oleh Sekda, didalamnya ada Keuangan, Pembangunan, Bapedda.
- P: Untuk khusus prabencana berapa pak pagu anggaran?
- I: Ya itu ada mas di SK..
- P: Tapi realisasinya kok Cuma 1% sekian pak?
- I: *Yaa sek gurung mas engkok mari rioyo lak kalah kabeh iku.* Realisasi semua.
- P: Tapi kok ini pagunyan yang tertinggi di bidang 3 rehabilitasi dan rekonstruksi?
- I: *Yo iku mas.. padahal doktrin kebencanaan itu kan di prabencana. Aku yo seneng-seneng ae. Aku yo seneng jane nek diundakno.*tapi pagunya Cuma segitu.
- P: Untuk sumber pendanaan sendiri dari mana pak?
- I: Sumber pendanaan ya APBN, APBD, beberapa ada dari swadaya masyarakat terus dunia usaha dengan CSRnya
- P: Pengelolaannya sudah efektif, efisien, akuntabel?
- I: *Mestine iyo, artine efektif iku* apa yang kita keluarkan tepat sasaran *ya gitu wes prinsip wong normal, hahahah...*pokoknya setiap pengajuan anggaran kan kita wajib membuat LPJ mas ya itu sudah merupakan bentuk akuntabilitas.
- P: Dinas lain mengajukan anggaran ke BPBD?
- I: *Enggak* jadi kita dan mereka (SKPD terkait) *nganggarkan* sendiri ke Bapedda, anggaran pribadi masing-masing.
- P: Terkait sarana prasarana penunjang penanggulangan bencana gimana pak?
- I: Ya *onok mas..* sudah terinventarisir dengan baik mas datanya bisa lihat di kesekretariatan. Itu untuk di BPBD jadi misal nanti ada bencana dan kita kekurangan sarana prasarana misalnya nanti dari BNPB ataupun Dinas terkait di Kabupaten Jember akan saling bergerak membantu.
- P: Kebijakan yang ada terkait kebencanaan apa sudah menunjang kinerja terkait penanganan kebencanaan pak?
- I: Ya pada dasarnya kebijakan PB yang ada di Kabupaten Jember itu belum ada mas ya kita mengacu pada Undang-undang, PP, Perka (Peraturan Kepala) dan sebagainya. Secara umum menunjang tetapi kalau secara khusus mungkin butuh pengembangan dan mungkin tahun ini.
- P: Kebijakan – kebijakan yang ada apa sudah sinergi dengan instansi lain?

- I: Ya sudah mas. Jadi misal dinas pengairan mengadakan apa yang berkaitan dengan kebencanaan itu kita dilibatkan, kemudian di bakesbang itu juga ada KBN juga kita dilibatkan.
- P: Terkait komitmen penanggulangan bencana ke depan *gimana?*
- I: Ya yang pertama adalah komitmen membangun *brain*. *Brain* itu peningkatan kapasitas. *Seng dibangun iku uteke mas.*
- P: Selain brain itu apa lagi?
- I: Peningkatan sarana prasarana penunjang supaya sempurna jadi fokus kita juga. Jadi dua hal itu yang kita bangun. Selain itu komitmen yang akan kita lakukan antara lain kerjasama dengan berbagai pihak terkait pengembangan alat pendeteksi banjir bandang, pengembangan system peringatan dini yang komprehensif yang kita integrasikan dengan desa tangguh bencana bentukan BPBD, pendidikan para relawan kita kolaborasi dengan universitas jember,
- P: Kebijakan/ perda tentang penanggulangan sendiri kan belum ada pak itu gimana?
- I: Seperti kata saya tadi sudah dianggarkan dan mau direalisasikan jadi Penyempurnaan pemetaan daerah rawan malah tahun ini, Raperda RPB dulu sebenarnya sudah kita usulkan tapi ya gitu kemarin *kesamplok* gara-gara teknis anggaran yang sedemikian rupa *akhire* telat. Tapi kalau kebijakan berupa SK Kaban dan yang lain yang bentuknya edaran itu ada.
- P: Untuk sistem *reward and punishment* apa ada pak untuk penanggulangan bencana?
- I: Ya ada kalau aturan di PNS itu seperti penghargaan bintang jasa tapi *lek* khusus kebencanaan belum ada. Ya kalau insentif misal mau ada sosialisasi kemana gitu ya ada uang transportnya untuk masyarakat juga sebagai pengganti mereka tidak bekerja pada hari itu.
- P: Tupoksi sudah dibagi pak tiap tiap dinas?
- I: Iya di perda itu ada secara nasional juga melalui Undang –Undang Nomor 24 dan PP Nomor 21.
- P: Tidak ada overlapping itu ya pak?
- I: Tidak ada mas, ya kan tupoksinya sudah disesuaikan dengan tupoksi masing-masing SKPD.
- P: Bentuk koordinasinya antara BPBD, SKPD, Kecamatan dan Masyarakat itu gimana pak?
- I: Ya ada pelaporan dari SKPD, terkait kegiatan yang sudah dilakukan berkaitan dengan kebencanaan, terus ada forum TRC yang tadi itu, forum renkon melalui *medsos* juga. Radio HT itu, ya kita iku opo yo.. intinya koordinasi kan intensitas kita *ketemu* saja *ketemu nak* renkon *yo* koordinasi *nak* renkon, *nak* TRC *yo* TRC itu kan bagian dari koordinasi *ketemu* bareng. Kalau di masyarakat kita ada Destana (Desa Tangguh Bencana) sebagai organisasi mandiri yang ada di desa untuk menangani bencana atau jadi garis depan. Itu sebagai bentuk sebagai stimulan kita. Namun sebagaimana yang saya katakana tadi kita masih butuh peningkatan dalam jumlah terbentuknya

destana. Kalau ndak salah masih sekitar 11 desa yang sudah dibentuk dengan berbagai tingkat kerawanan wilayah. Sebagai contoh desa sidomulyo di Kecamatan Silo itu kita bentuk destana gunung meletus karena daerah sana rawan terkena dampak letusan Gunung Raung.

P: Di prabencana sendiri apa ada forum khusus pak?

I: Untuk forum khusus prabencana itu kita sudah mengajukan 2 kali belum di *acc*, ada *anu* namanya FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) *iku yo sakjane* wadah untuk ngomong aja untuk *eksplora* ide *intine* untuk memudahkan koordinasi.

P: Pusdalops itu seperti apa?

I: Ya itu pusat pengendalian operasi itu ada perkanya BNPB Tentang Pusdalops dan penanganannya berada di bawah bidang 2 kalau saat terjadi bencana tapi saat tidak ada bencana itu menjadi pengelolaan bidang 1.

P: Intensitas koordinasi gimana pak?

I: Ya setiap saat sampek bosan aku kakean koordinasi...jadi setiap ada informasi peringatan dini ya kita sebarke ke dinas, kecamatan, kades gitu.

P: SOP atau renkon untuk banjir bandang ini apa sudah ada pak?

I: Untuk sementara yang ada di kita ini renkon/ SOP penanggulangan bencana Gunung Raung karena yang *urgent* kemarin itu erupsi Gunung Raung. Untuk bencana yang lainnya Insya Allah tahun ini kita buat juga tahun anggaran 2016 sebelum desember saya harus menyelesaikan itu.

P: Mungkin cukup sekian pak. terima kasih pak atas kerjasamanya

I: Ya mas sama-sama ya..

2. Informan Utama 1

Karakteristik informan:

- a. Nama : SB
- b. Instansi : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Jember
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Jabatan : Kabid Perlindungan.

Peneliti menemui informan di kantor Disbunhut Kabupaten Jember pada tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 10.25 WIB. Sebelumnya, peneliti telah membuat janji temu dengan informan dan menemui informan di ruang kerjanya. Pada saat wawancara dilaksanakan hanya ada peneliti dan informan dalam ruangan kantor.

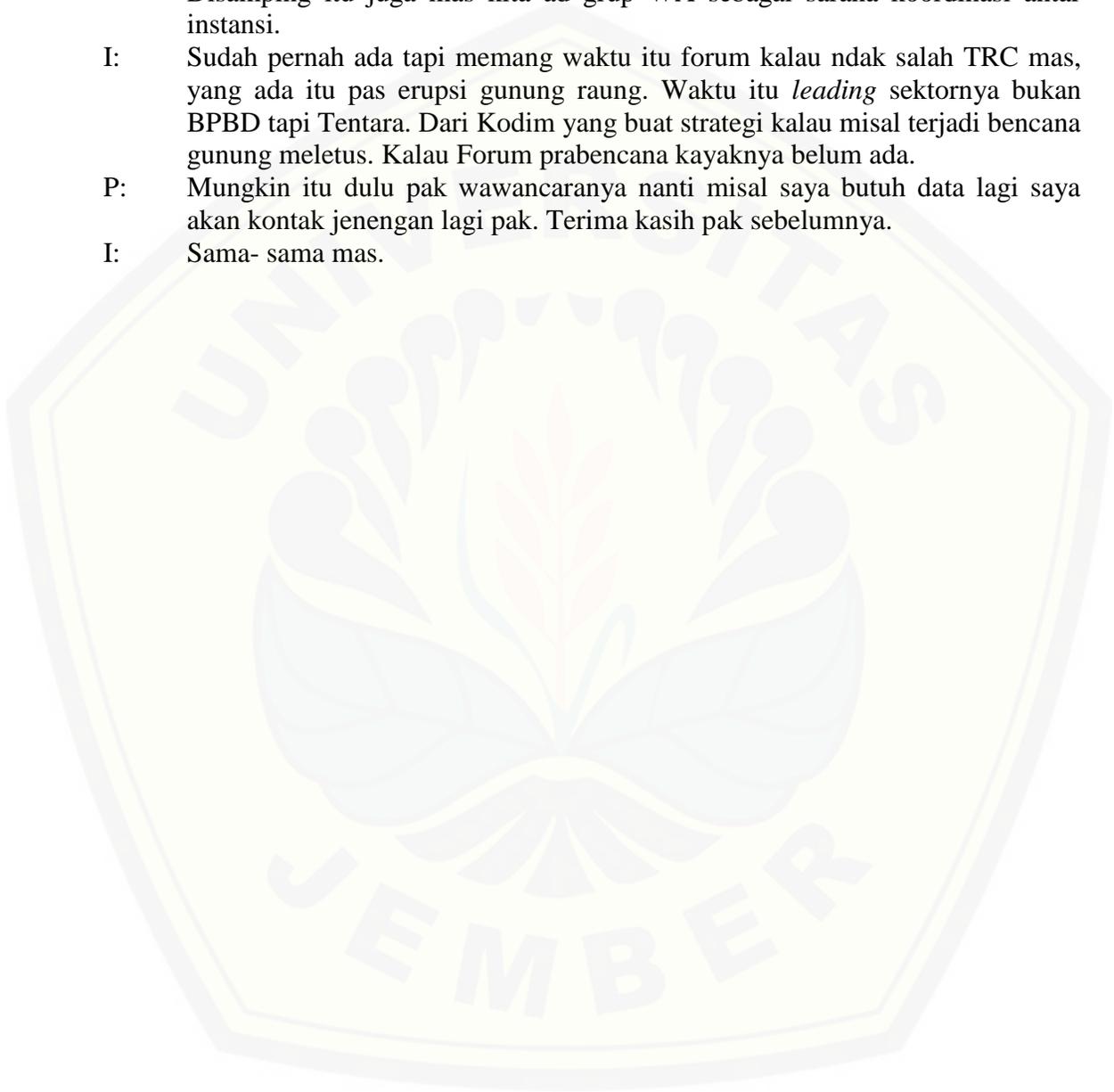
Hasil wawancara mendalam

- P: Assalamualaikum pak, perkenalkan saya fandi dari FKM Universitas Jember mau mewawancarai *jenengan* terkait skripsi saya pak, saya ambil tema terkait penanggulangan prabencana jadi secara gambaran kasarnya saya ingin mengetahui bagaimana pola koordinasi antara BPBD dan instansi terkait khususnya pada fase prabencana pak.
- I: Ooo.. jadi terkait penelitian sampean yang anda inginkan itu apa *monggo* yang mau ditanyakan mas silahkan
- P: Bagaimana bentuk sosialisasi terkait penanggulangan prabencana yang dilakukan BPBD ?
- I: Sosialisasinya ya yang pernah dilakukan itu seingat saya ya *pas* membuat itu perencanaan apa itu... kontijensi. Renkon..itu kita diundang sama juga kita kan terbentuk dalam tim ya disitu juga biasanya biasanya..
- P: Kalau sosialisasi secara tidak langsung yang *jenengan* ketahui itu apa pak?
- I: Ya.. mungkin pemasangan jalur evakuasi itu, terus peta rawan bencana.
- P: Terkait peran SDM yang dihimpun dari SKPD sendiri gimana pak? Juga terkait unsur pengarah yang beranggotakan 9 yang mana 5 berasal dari instansi terkait?
- I: Ya perannya disesuaikan mas dengan tupoksi masing-masing SKPD nya. Kalau masalah unsur pengarah saya kurang paham mas mungkin bisa ditanyakan di BPBD langsung.
- P: Untuk kegiatan pelatihan pak apa pernah ada untuk meningkatkan kompetensi SDM khususnya terkait Penanggulangan bencana?

- I: Ya ada mas kebetulan saya dan beberapa staf yang ditunjuk mewakili Disbunhut..
- P: Pelatihan apa saja pak yang sudah diikuti?
- I: Ya pelatihan dasar kebencanaan, juga pernah pelatihan menghitung kerugian akibat bencana.
- P: Pelatihannya ini terjadwal pak? Jadi misal berkesinambungan gitu pak?
- I: Katanya dulu *gitu* setelah ada pelatihan ini nanti ada pelatihan lagi. Tapi kapannya belum tahu..
- P: Terkait mekanisme pengajuan anggaran pak, apa dari dinas sini mengajukan anggaran ke BPBD pak?
- I: *Eggak enggak ndak* ada mas.
- P: Terkait sarana prasarana penunjang kegiatan Prabencana apa ada pak?
- I: Kalau khusus untuk bencana banjir bandang disini memang tidak ada tapi kalau tril ada jadi semisal sewaktu-waktu dibutuhkan ya bisa dipakai, terus ada pick up juga ada.
- P: Sepengetahuan *jenengan* pak terkait kebijakan penanggulangan bencana khususnya yang ada di kabupaten Jember ini apa sudah ada pak? Apa kebijakan-kebijakan yang ada terkait penanggulangan bencana sudah mendukung kinerja?
- I: *Waduh* kalau itu langsung Tanya ke BPBD saja mas mungkin yang lebih paham. Tapi selama ini khususnya dalam upaya penanggulangan bencana itu sudah efektif menurut saya perkara nanti ada Perda khusus itu mungkin akan lebih baik lagi sepanjang tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lainnya.
- P: Komitmen ke depan terkait penanggulangan prabencana bagaimana pak?
- I: Ya kita mendukung penanggulangan prabencana sesuai tupoksi kita. Ibarat kue *tart* dibagi beberapa potongan. Potongan iku terdiri atas Dinas PU, Dinkes, termasuk potongan kue *tartnya* Dishutbun la di situ apa tupoksi kita tidak boleh keluar dari potongan tadi. Sehingga kalau disatukan jadi satu kue *tart* bisa di makan *wong akeh*.
- P: Ada semacam bentuk *reward and punishment* pak dalam melaksanakan penanggulangan bencana?
- I: Setahu saya belum belum ada mas.
- P: Tupoksi dari dishutbun ini apa pak? Apa terdapat tupoksi tambahan dari BPBD?
- I: Tupoksi kita ini penanganan lahan kritis, atau istilahnya rehabilitasi lahan kritis, ada sipil teknis ada vegetatif.. la tugas kita tidak boleh melenceng dari tupoksi kita. Ya paham maksudnya.. untuk menanggulangi lahan kritis otomatis kita butuh data, bisa dari data primer atau dari data GIS.
- P: Terkait koordinasi yang terjalin antara BPBD dengan SKPD terkait itu seperti apa pak?
- I: Ehmmm oke.. jadi mas khusus untuk bencana koordinasi antara kita dengan BPBD sudah terjalin sejak BPBD pertama kali didirikan, BPBD ini kan baru ya...ituu sudah terkoordinasi dan kita sudah terbentuk dalam sebuah tim.

Terkait tim ini kita dipersiapkan untuk pascabencana. Jadi kita melakukan pelaporan yang sesuai dengan tupoksi kita contoh daerah jember ini berapa luas lahan kritisnya? Itu kita yang menghitung dan data tadi kita laporkan ke BPBD. Disamping itu juga ada grup WA sebagai sarana koordinasi antar instansi.

- I: Sudah pernah ada tapi memang waktu itu forum kalau tidak salah TRC mas, yang ada itu pada erupsi gunung raung. Waktu itu *leading* sektornya bukan BPBD tapi Tentara. Dari Kodim yang buat strategi kalau misal terjadi bencana gunung meletus. Kalau Forum prabencana kayaknya belum ada.
- P: Mungkin itu dulu pak wawancaranya nanti misal saya butuh data lagi saya akan kontak jenengan lagi pak. Terima kasih pak sebelumnya.
- I: Sama- sama mas.



3. Informan Utama 2

Karakteristik informan:

- a. Nama : LL
- b. Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Jabatan : Kasi Kesehatan Rujukan

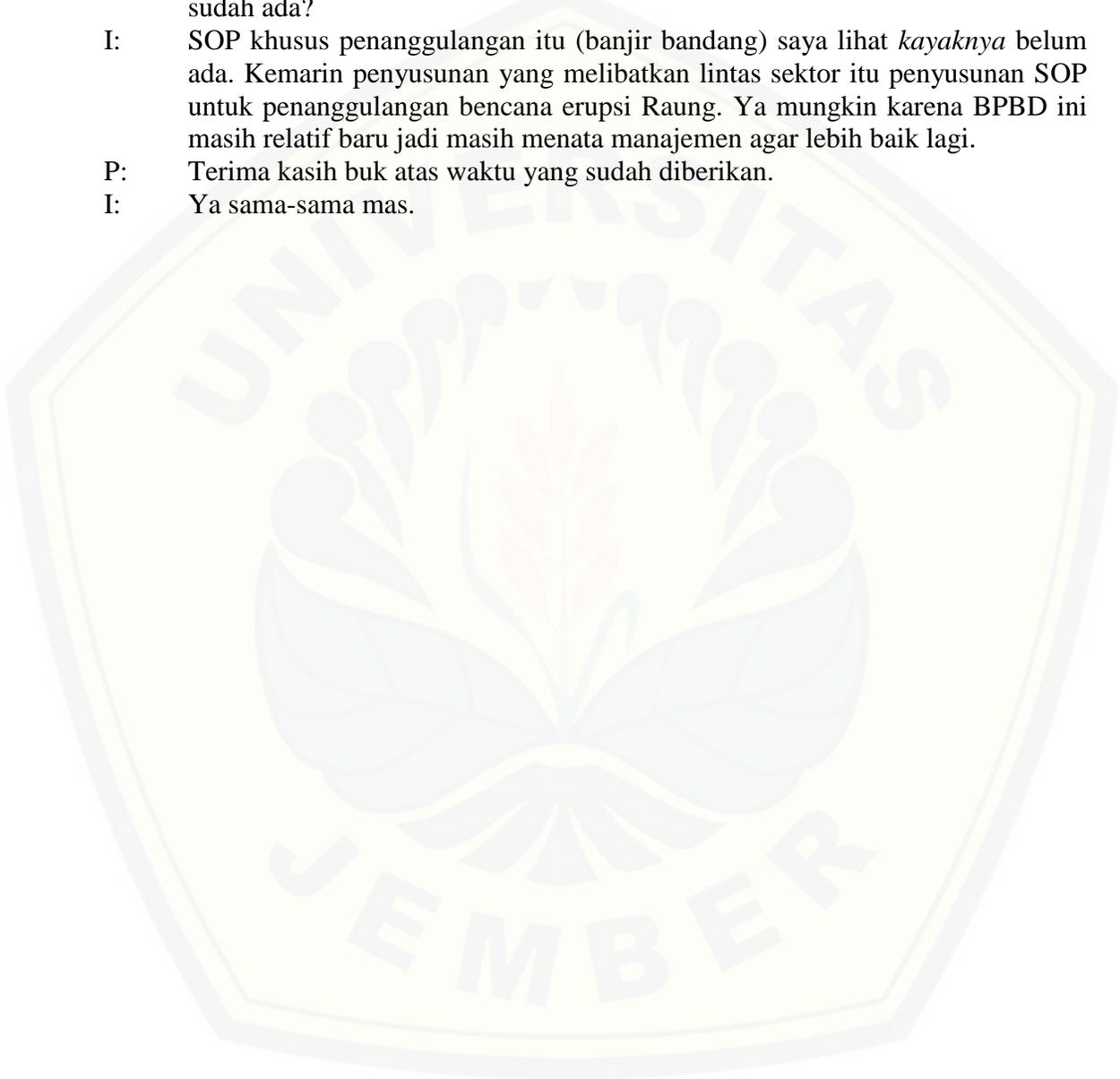
Peneliti menemui informan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada tanggal 14 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, peneliti telah membuat janji temu dengan informan dan menemui informan di ruang kerjanya. Pada saat wawancara dilaksanakan hanya ada peneliti dan informan dalam ruangan kantor.

Hasil wawancara mendalam

- P: Bentuk sosialisasi yang pernah diterima ataupun diketahui oleh Dinkes dari BPBD itu seperti apa?
- I: Sosialisasinya ya pas ada rapat itu mas, terus juga ada jalur evakuasi, di media cetak dan elektronik itu.., terus di internet kan ada itu websitenya tapi informasinya kurang *update*.
- P: *Ehmm* terkait materi dalam sosialisasi itu ada apa saja buk?
- I: Ya ada materi dasar kebencanaan misalnya informasi KRB(kawasan rawan bencana) terkait pencegahan, kesiapsiagaan, EWS, mitigasi, terus juga ada simulasi.
- P: Saya pernah baca di perda BPBD itu ada unsur pengarah dan unsur pelaksana apa Dinkes masuk dalam unsur pengarah?
- I: Saya *gak tau* masuk apa ndak mas sebagai unsur pengarah tapi yang jelas itu sudah dibagi sesuai klaster klasternya. Ada klaster kesehatan, kalster sosial.
- P: *Ehmm..* untuk pelatihan itu apa ada jadwalnya buk?
- I: Jadi jauh sebelum BPBD ada ini kami sudah ada pelatihan di Jakarta, kita juga ngadakan sendiri pelatihan PPGD artinya pelatihan itu tidak *nunggu* BPBD soalnya kita dulu kan ada Satlak, BPBD kan baru lahir tahun 2013 ini.
- P: Tapi setelah BPBD terbentuk apa pernah melakukan pelatihan?
- I: Kalau BPBD sudah pelatihan kita diajak ke BNPB pusat untuk pelatihan TRC. Kalau di sini kita melatih jadi BPBD mengadakan pelatihan kita diajak, sebagai narasumber untuk pelatihan di kesiagaan bencana di Unej kan Unej di *opo* sebagai pusat kajian pelatihan penanggulangan bencana.

- P: Terkait pengalokasian anggaran dinas itu apa mengajukan anggaran *buk* ke BPBD?
- I: Kalau urusan anggaran dengan BPBD kita *gak tau*, saya *ngajukan* anggaran untuk kegiatan saya untuk prabencana kalau untuk bencananya kita *gak bisa* karena bencana kan tidak bisa diprediksi tapi terkait dana apabila bencana terjadi itu melekat di BPBD kenyatannya saya *gak ngerti* bagaimana pengelolaannya pada saat ada bencana kita tidak ada anggaran khusus dengan serta merta keluar itu *gak* ada, untuk prabencana kita gunakan pembinaan untuk petugas tapi bukan ke BPBD pengajuannya tapi langsung ke Pemda.
- P: Terkait ketersediaan sarana prasarana penunjang gimana *buk*?
- I: Oh.. ketersediannya cukup misalnya obat-obatan karena kita manajemen logistik kalau di kesehatan itu kan menggunakan rutin *buffer* stoknya ada. Kalau memang suatu saat dibutuhkan ya siap.
- P: Menurut ibu bagaimana Perda terkait penanggulangan bencana, apa sudah efektif menunjang kinerja? Apa perlu *buk* ada penerbitan perda khusus untuk itu?
- I: Yaa untuk pelaksanaannya *ndak* perlu perda juga bisa terkait itu Undang-Undang dan peraturan dari BPBD sendiri sudah lengkap sebenarnya. Peruntukan perda sendiri untuk apa walaupun istilahnya ada istilah otonomi daerah ya.. tapi kalau memang itu dirasa perlu ya mungkin bisa diusulkan.
- P: Untuk komitmen ke depan dari Dinkes dalam penanggulangan bencana itu seperti apa?
- I: Komitmen kita menyiapkan itu penanggulangan bencana dilaksanakan mulai dari prabencana sudah ada rencana, missal sekarang ada bencana kita prabencana sudah ada terus bukti-buktinya ada kita kan kluster kesehatan gitu, selain ikut kegiatan yang dilaksanakan BPBD periodik juga melaksanakan sendiri dengan koordinasi lintas sektor juga kemudian kita juga membuat sistem informasi bukan hanya bencana yang besar tapi juga kegawatdaruratan sehari-hari artinya begini kalau ada kejadian bencana dimanapun nanti dinformasikan jadi semacam *public safety center* ini juga wujud dari kebijakan bupati yang baru yang satu ambulan satu desa.
- P: Apa tupoksi yang didapatkan Dinkes terkait kebijakan penanggulangan prabencana banjir bandang dari BPBD?
- I: Itu sesuai kluster-kluster tadi ada kesehatan ya jelas tupoksinya tentang kesehatan.
- P: Untuk koordinasi antara BPBD dan instansi terkait dalam hal ini Dinkes itu sering apa insidental *buk*?
- I: *Ehmmm..* kalau dibilang sering itu kan ada definisinya yang dimaksud sering itu seberapa *ndak* sering itu seberapa? Pokoknya tiap tahun itu mesti ada. Kita kan sudah ada timnya TIM TRC dan TIM Jitu Pasna (pengkajian kebutuhan pascabencana) yang merupakan wadah untuk koordinasi antara BPBD dengan SKPD terkait, dan pelaksanaannya periodik. Kita juga ada WA grup.

- P: Berarti forumnya itu ya di TIM TRC sama TIM Jitu Pasma, untuk Tim yang untuk prabencana belum ada kayaknya ya bu?
- I: Kalau tim khusus prabencana belum ada memang mas.
- P: Terkait SOP khusus penanggulangan bencana khususnya banjir bandang apa sudah ada?
- I: SOP khusus penanggulangan itu (banjir bandang) saya lihat *kayaknya* belum ada. Kemarin penyusunan yang melibatkan lintas sektor itu penyusunan SOP untuk penanggulangan bencana erupsi Raung. Ya mungkin karena BPBD ini masih relatif baru jadi masih menata manajemen agar lebih baik lagi.
- P: Terima kasih buk atas waktu yang sudah diberikan.
- I: Ya sama-sama mas.



4. Informan Utama 3

Karakteristik informan:

- a. Nama : M
- b. Instansi : Kecamatan Pantii Kabupaten Jember
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Jabatan : Kasi Trantib

Peneliti menemui informan di kantor Kecamatan Pantii Kabupaten Jember pada tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 WIB. Sebelumnya, peneliti telah membuat janji temu dengan informan dan menemui informan di ruang kerjanya. Pada saat wawancara dilaksanakan hanya ada peneliti dan informan dalam ruangan kantor.

- P: Terkait sosialisasi yang bapak ketahui dari BPBD itu seperti apa pak? Intensitasnya mungkin pak?
- I: BPBD kan baru mas ya. ah BPBD ini nanti umpamanya katakanlah ada katakanlah dalam arti disini kan ada cuaca ini kan sudah di perkirakan *toh* mas jadi kalau ini musim hujan ini kita rutin sosialisasi mas oleh BPBD.
- P: Bentuk koordinasinya sendiri seperti apa pak antara BPBD dan Kecamatan?
- I: Jadi koordinasi dengan kita pol pp lewat camat jadi BPBD itu BPBD bukan hanya langsung meluncur melakukan sosialisasi *gitu*,.. ya gak bisa mas yang punya wilayah kan camat. Camat itu disposisi ke saya, Dampingi! ya kita damping.. *tapi yo gak sering mas.. kan disesuaikan ambek anggaran..* tidak sering dalam arti umpanya katakan ini rawan jadi kan kita tahu umpamanya bulan *iki* cuaca seperti ini *iku* pasti BPBD turun.
- P: Tupoksi kecamatan sendiri seperti apa pak dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana?
- I: Untuk kecamatan mas khususnya di kami trantib itu misalnya ada daerah rawan mana saja di kecamatan kita itu kita laporkan ke BPBD gitu lo. Jadi kaitannya kita ini untuk mencegah lah apa istilahnya itu *ehmm..* ya prabencana seperti itu kurang lebih.
- P: Terkait adanya peran SDM dari kecamatan dalam kaitannya sebagai unsur pengarah dalam penanggulangan bencana itu bagaimana pak?
- I: Itu kami gak tahu mas. Pokoknya di sini ada 9 staf 10 dengan saya disini ada 7 desa itu di tujuh desa itu kita pasang satu-satu untuk *stand by* sama saya jadi

terus koordinasi. Jadi kalau sudah kita prediksi itu sudah rawan ya kita harus siaga.

P: Apa bapak tahu terkait destana? Desa tangguh bencana bentukan BPBD. Apa pernah dilakukan peningkatan kapasitas oleh BPBD di Destana tersebut?

I: Iya mas .. kalau di Panti iniyang diutamakan itu di Desa Kemiri tapi semua desa itu ada mas.. jadi istilahnya kita sedia payung sebelum hujan mas.. peningkatan kapasitas itu kalau tidak salah dilakukan sekitar satu bulan yang lalu.. dan tim dari BPBD itu datang mas.

P: Komitmen kecamatan untuk kedepan pak?

I: Rencana kita, di kecamatan ini kan posko, ini kita mau rekrut relawan yang ada di kecamatan dan di desa. Rencananya kita akan saran untuk 2017 mau mengajukan untuk pengadaan sarana prasarana misalnya trail mas untuk naik meninjau wilayah tapi ya untuk realisasinya ya terserah atas. Kita kan punya pimpinan punya DPRD.

P: Bentuk-bentuk kebijakan yang ada apa sudah efektif menunjang kinerja?

I: Kalau kebijakan dikita kita biasanya persurat mas, jadi ada surat dari BPBD katakanlah ya nanti akan turun SK camat untuk menindaklanjuti surat itu.

P: Apa ada semacam pemberian reward atau mungkin hukuman pak dalam usaha terkait penanggulangan bencana khususnya di prabencana? Mungkin dalam bentuk piagam penghargaan atau insentif?

I: Kalau saya mas untuk menanggulangi bencana untuk soal penghargaan itu nomor 2 mas kita jangan bicara itu. Bukan aku sok suci mas kita harus melihatnya pakai kaca mata hati. Untuk menanggulangi bencana itu butuh keikhlasan mas bukan butuh penghargaan nanti kerja kita kalau melihat itu ya kerja kita pamrih. Motivasi saya kerja itu ibadah mas.

P: Kalau insentif uang *transport pas* waktu ada kegiatan apa ada pak?

I: Kalau itu mesti ada mas dari pihak penyelenggara kegiatan misal BPBD mengadakan sosialisasi itu ya mesti ada *transport* untuk pesertanya. Ya sebagai pengganti waktu mereka mas.

P: SOP ada pak?

I: Kalau saya belum terima mas.

P: Terima kasih pa katas waktunya.

I: Sama-sama mas.

5. Informan Utama 4

Karakteristik informan:

- a. Nama : AP
- b. Instansi : Kecamatan Silo Kabupaten Jember
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Jabatan : Kasi Trantib

Peneliti menemui informan di kantor Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 WIB. Sebelumnya, peneliti telah membuat janji temu dengan informan dan menemui informan di ruang kerjanya. Pada saat wawancara dilaksanakan hanya ada peneliti dan informan dalam ruangan kantor.

Hasil wawancara mendalam

- P: Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD itu bentuknya seperti apa pak bentuknya?
- I: Aaa.. pada waktu itu sosialisasinya aa diberikan sosialisasi masalah ewa tapi karena masih belum terdampak langsung ya sosialisasi itu sebagai langkahantisipasi dari BPBD. Ya ada pemasangan jalur evakuasi juga.
- P: Bentuk koordinasi yang dilakukan untuk penanggulangan bencana sendiri seperti apa pak?
- I: Ya kita kerjasama dengan Muspika, tokoh-tokoh masyarakat di desa, terus ya semuanya lah RT/ RW, perangkat desa itu yang paling dititikberatkan kalau koordinasi. Juga kalau koordinasi itu ada pakai HT dan HP juga, tapi itu juga *ndak* semua kecamatan itu punya HT jadi kurangnya untuk HT ini jadi yang gak punya HT ya pakai HP.
- P: Terkait sosialisasi tidak langsung pak, apakah semua aspek sudah dilakukan misalnya saja sosialisasi terkait peta rawan, pamphlet, poster media cetak, elektronik, jalur evakuasi, dan website resmi bpbd jember?
- I: Setahu saya itu semua sudah dilakukan misalnya peta rawan itu sudah ada tapi di kita tidak dipasang karena masih ada sengketa wilayah dengan pihak Kabupaten Banyuwangi. Poster sudah, *pamphlet*, jalur evakuasi. *Laa* untuk website ini saya kurang tahu mas ada apa tidak, mungkin ada tapi apakah *update* terus atau tidak kita *nggak* tahu.
- P: Pelatihan untuk penanggulangan bencana apa ada pak dari BPBD?

- I: Ada ..jadi biasanya langsung dilaksanakan di kantor BPBD nya. Perwakilannya biasanya dari desa masing-masing yang rawan. Dari kecamatan gak ada. Tapi tetep koordinasinya sama muspika karena muspika ini sebagai ujung tombak di tingkat kecamatan.
- P: Terkait simulasi di masyarakat gimana pak?
- I: Simulasi setahu saya belum ada untuk banjir bandang. Adanya simulasi untuk gunung meletus karena kemarin kan gunung raung indikasinya akan meletus jadi mungkin dari BPBD Kabupaten Jember difokuskan untuk itu dulu.
- P: Pelatihannya tentang apa *gitu* tahu pak?
- I: Setahu saya *ya* ada pelatihan dasar kebencanaan, terus evakuasi korban *ya* pokoknya penanganan bencana itu *lah* rata-rata itu yang dilakukan.
- P: Untuk itu pak terkait anggaran dana untuk penanggulangan bencana ada pak?
- I: Itu murni dari BPBD kalau di kecamatan itu *gak* ada anggarannya. Di kecamatan kalau masalah anggaran *ya* hanya anggaran untuk kegiatan kecamatan. Jadi misal terjadi bencana *ya* kita mengajukan misal kecamatan butuh *opo* nanti *ya* langsung dari BPBD. Itu masalahnya jadi kalau ada apa-apa karena tidak ada anggarannya misal terjadi bencana *ya* masih kontak BPBD akhirnya, *ya* mungkin di semua kabupaten- kabupaten *ya* sama.
- P: Terkait sarana prasarana yang ada di kecamatan itu apa saja pak?
- I: *Ya* kita ada HT sama mungkin mobil Pol PP itu untuk perbantuan mungkin tiba-tiba ada masalah yang gawat misalnya bencana.
- P: Kecamatan mendapat sosialisasi terkait destana pak?
- I: Itu kemarin yang sudah disiapkan rencananya desa Sidomulyo tapi untuk bencana gunung raung yang untuk banjir tanah longsor kayaknya belum mas. Kan sini dulu pernah tahun 2009 kalau gak salah itu terjadi banjir bandang sama tanah longsor itu di desa Pace. Harusnya juga menjadi pertimbangan untuk dibentuk Destana juga.
- P: Terkait fasilitas penunjang untuk penanggulangan bencana bagaimana pak? Apa sudah lengkap?
- I: Sepengetahuan saya belum lengkap mas, kan itu juga sarpras hasil himpunan tidak hanya dari BPBD saja tetapi dari BNPB, SKPD terkait di Kabupaten Jember. Cuma menurut saya seperti sarpras yang *urgent kayak* peralatan dapur umum, tenda pengungsian itu kalau bisa di standby kan di Kecamatan jadi missal nanti ada bencana *Der* kita tidak menunggu lama.
- P: Sepengetahuan bapak apa sudah ada perda khusus penanggulangan bencana di Kabupaten Jember?
- I: Saya kurang tahu mas, tapi kalau sudah ada BPBD masak belum ada *sih* mas Perdanya? Tapi *ya* kalau sudah ada perda mestinya sudah ada sosialisasi terkait itu.
- P: Terkait insentif apa ada pak sepengetahuan Bapak? Mungkin *pas* BPBD ada kegiatan yang mengundang warga..

- I: Biasanya itu ada mas, kan sudah ada anggarannya dari BPBD untuk itu juga. Secara umum semua instansi kalau hanya sekedar untuk itu (*transport*) pasti ada mas.
- P: Apa ada forum khusus pak dari BPBD untuk pembahasan misal pencegahan bencana?
- I: Kalau forum khusus apa kayak muspika itu mas? jadi BPBD, Muspika,, Muspika 3 unsur itu ya Koramil, Polsek, Kecamatan terus tambah desa. La di forum itu rutin memang tapi pembahasannya kan banyak tidak hanya bencana saja. Ya ada bahasan yang sifatnya rutin dan insidental.
- P: Terkait komitmen ke depan untuk penanggulangan bencana seperti apa pak?
- I: Kalau kita mengharapkan terkait dengan komitmen kecamatan sendiri mengharapkan dari dinas terkait misalkan dengan BPBD sendiri atau mungkin Dinas lainnya agar lebih komprehensif koordinasinya jadi lebih mengedepankan koordinasi. jadi kadang-kadang itu tanpa melalui kecamatan langsung ke masyarakat. Kadang kadang seperti itu saya sendiri yang punya wilayah kan waktu itu jalur evakuasi tiba-tiba sudah dipasang tidak ijin ke kita. Jadi istilahnya yang punya wilayah ya harus dihormatilah bukan dihormati apa ya.. ya minimal ijin lah. Ya koordinasinya itu kalau bisa yang tertata. Kalau institusi yang dibawah gak kompoak ya bahaya carut marut nanti.
- P: SOP apa ada pak terkait penanggulangan bencana?
- I: Kalau itu kita gak ada, mungkin di BPBD ada. Waktu sosialisasi SOP penanggulangan bencana banjir bandang itupun belum disampaikan juga.
- P: Baik pak terima kasih atas kerjasamanya.
- I: Ya mas.

6. Informan Utama 5

Karakteristik informan:

- a. Nama : R
- b. Instansi : Dinas Sosial Kabupaten Jember
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Jabatan : Kasi Kesehatan Korban Bencana dan Sumbangan Sos.

Peneliti menemui informan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Jember pada tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 12.30 WIB. Sebelumnya, peneliti telah membuat janji temu dengan informan dan menemui informan di ruang kerjanya. Pada saat wawancara dilaksanakan hanya ada peneliti dan informan dalam ruangan kantor.

Hasil wawancara mendalam

- P: Bagaimana pak bentuk sosialisasi yang didapatkan oleh dinsa terkait penanggulangan kebencanaan khususnya prabencana?
- I: Ya selama ini terkait sosialisasi yang kita dapat itu ada yang bentuknya langsung melalui rapat-rapat koordinasi dan juga sosialisasi tidak langsung melalui peta daerah rawan bencana, poster, jalur evakuasi.
- P: Intensitas sosialisasi sendiri gimana pak?
- I: Jadi untuk sosialisasi terkait kebencanaan itu ada yang sifatnya rutin dan ada yang sifatnya insidental. Selama ini BPBD mengundang kita sebagai dinas terkait itu lebih kepada insidental sebagai contoh kemarin saat erupsi raung. Substansinya bisa juga terkait dengan jalur evakuasi kemudian ada rencana evakuasi/ mobilisasi sumber daya. Kalau kegiatan rutin itu biasanya yang sudah ada di program kegiatan dimana anggaran itu berjalan misal sekarang anggaran 2016.
- P: Sosialisasi yang dilakukan sudah efektif menurut *jenengan* pak?
- I: Iya iya sudah karena tadi ada pembedaan sosialisasi yang insidental dan juga rutin.
- P: Terkait peran Sumber daya yang dihimpun dari SKPD hingga masyarakat itu seperti apa pak? Apa ada yang terlibat dalam unsur pengarah sesuai dengan Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang BPBD Kabupaten Jember?
- I: Khusus yang konsen dengan penanggulangan bencana itu ada Tagana yang berjumlah 80 orang yang terdiri dari berbagai kalangan ada pengusaha, pegawai swasta, mahasiswa, dsb dan kami tidak membatasi elemen-elemen apa saja yang mau membantu dan yang terpenting teman-teman itu

memberikan kontribusi untuk penanggulangan bencana. untuk masalah unsur pengarah sepertinya belum ada mas. Kami belum terlibat tapi *ndak tau* dinas lainnya.

P: Bagaimana pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh Dinsos pak? Ataupun pernah ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh BPBD?

I: Jadi gini mas, untuk kegiatan kita bedakan kegiatan *outdoor* dan *indoor*, untuk kegiatan yang bersifat *outdoor* kita juga sudah seharusnya melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk mengeliminasi kejadian bencana contohnya kegiatan mitigasi. Jadi kita mobilisasi untuk melakukan kegiatan di lapangan langsung on the spot situasi pada saat itu. Kalau *indoor* itu yang pernah diselenggarakan BPBD kegiatan TTE table top excersice yang diikuti para stakeholder yang dilaksanakan awal tahun ini kalau gak salah tentang erupsi gunung raung. Ehmm itu juga mas semacam gladi atau simulasi dasar kebencanaan.

P: Kalau TTE tentang Banjir Bandang apa pernah ada pak?

I: Setahu saya belum ada mas karena mungkin melihat prioritas ya.. soalnya kemarin kan ada erupsi gunung api.

P: Untuk peserta atau delegasi dari dinsos yang diikuti pelatihan itu bergantian pak?

I: Kalau itu ya kita lihat pelatihannya mas kalau sekiranya pelatihannya sifatnya berkesinambungan ya delegasinya tetap begitu.

P: Terkait plotting alokasi anggaran pak, apa Dinsos mengajukan anggaran ke BPBD selaku koordinator penanggulangan bencana?

I: Kalau terkait anggaran itu melekat di instansi masing-masing jadi sifatnya sektoral jadi tidak ada overlapping untuk anggaran. Dan wajib ada pelaporannya dana itu peruntukannya untuk apa saja, ya LPJ *gitu* mas.

P: Ketersediaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana gimana pak?

I: Ya ada mas kita ada HT, ambulans, perahu karet, tenda darurat pokoknya sarpras penunjang dalam penanggulangan bencana khususnya banjir bandang itu kita ada dan kondisinya baik. Tapi ya kalau misal mau dilakukan pengadaan itu mungkin diperlukan mas, tapi ya tergantung anggaran juga, tetapi ya semua itu bisa dimodel perbantuan mas, jadi misal nanti ada bencana banjir bandang, BPBD dan dinas terkait di Kabupaten Jember akan saling membantu apabila pada saat proses penanggulangan bencana ada kekurangan.

P: Bagaimana menurut Bapak terkait kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Jember? Efektif menunjang kinerja?

I: Kalau Perda untuk khusus penanggulangan bencana memang setahu saya belum ada yang ada itu Perda pembentukan BPBD, selama ini kalau melakukan kegiatan itu ada surat edaran dan juga SK misalnya SK pembentukan Kampung Siaga Bencana. menurut saya perlu ada perda yang mengatur itu meskipun kita sudah punya Undang-undang Nomor 24, PP 21

tahun 2008 tapi adanya Perda kan bisa disesuaikan dengan kapasitas daerah tersebut dalam melakukan penanggulangan bencana.

P: Bagaimana wujud komitmen Dinsos terkait Implementasi Kebijakan penanggulangan bencana kedepan?

I: Terkait Komitmen karena memang Dinsos merupakan salah satu unsur pendukung ya dalam penanggulangan bencana khususnya Kabupaten Jember yang dikoordinasikan oleh BPBD ke depan kita tetap konsisten mendukung sesuai dengan tupoksi dinas sosial sendiri.

P: Apa ada semacam pemberian *reward* atau *punishment* dalam bentuk insentif mungkin untuk memberi motivasi kepada pelaksana?

I: Kalau kita bicara penanggulangan bencana yak kan berarti kita memposisikan diri sebagai relawan. Kalau ada *reward* berupa insentif uang itu ada mas biasanya mungkin pas ada simulasi atau gladi. Selain itu, bentuk motivasi yang bisa diberikan bisa dengan transfer ilmu mas. Ataupun perlengkapan menunjang penanggulangan bencana yang sudah disiapkan apabila sewaktu-waktu bencana datang.

P: Tupoksi yang didapat Dinsos dari BPBD terkait Kebijakan penanggulangan prabencana banjir bandang itu apa?

I: Tupoksi yang kita dapat itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yakni mempersiapkan bahan dan data dalam melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam, menyelenggarakan dapur umum/bantuan darurat kepada korban bencana alam dan korban bencana social, melaksanakan pembinaan kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana).

P: Apa terjadi *overlapping* tupoksi antar dinas?

I: Tidak mas karena sudah disesuaikan masing-masing dinas atau instansi terkait tersebut.

P: Untuk Forum khusus untuk koordinasi masalah kebencanaan baik antara BPBD-SKPD SKPD-masyarakat apa ada pak?

I: Untuk forum khusus antara BPBD dan SKPD ada mas tapi kalau dikelompokkan forum pra-saat-dan pasca saya kurang paham pokoknya ada forum diskusi. Kalau di masyarakat, kami Dinas sosial ada yang namanya Kampung Siaga Bencana yang tahun kemarin baru diresmikan itu di desa Kemiri Kecamatan Panti.

P: SOP penanggulangan bencana apa ada pak?

I: Terkait Standar Operasional Prosedur, memang institusi dari Kementerian sosial itu sudah kita dapatkan khusus untuk Dinas Sosial sudah ada modul – modul maupun buku pedoman contoh SOP tentang pendirian *shelter* itu sudah ada, kemudian SOP terkait dengan Pelatihan tenaga dalam penanggulangan bencana itu sudah ada. Kalau SOP yang sifatnya spesifik yang sifatnya lokal itu dikoordinasikan oleh BPBD.

P: Tapi apa SOP terkait banjir bandang dari BPBD itu memang ada pak?

- I: Ada mas, jadi kalau SOP tentang tupoksinya itu sudah ada kemarin itu kita sama-sama membuat renkon Gunung Raung. *La* untuk banjir bandang saya juga kurang tau. Mungkin juga disesuaikan dengan prioritas kebencanaan pada saat itu dan masih proses. *Karna* memang untuk membuat SOP atau renkon tadi mas.. butuh waktu, tenaga dan tidak semudah itu kalau dikatakan sulit ya sulit tapi saya yakin BPBD bisa.
- P: Bentuk koordinasi yang sudah terjalin antara BPBD dengan Dinas social seperti apa? Intensitasnya bagaimana?
- I: Koordinasi yang dilakukan yakni internal dan eksternal. Koordinasi internal ya kita lakukan dengan taruna siaga bencana kalau yang eksternal ya kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Jember. Sifatnya bisa insidentil dan rutin mas. Kalau rutin wujudnya bisa pelaporan. Kalau insidentil biasanya tergantung ada kegiatan apa misalnya kemarin koordinasi ketika ada erupsi raung.
- P: Terima kasih atas waktu yang diberikan pak.
- I: Ya sama-sama mas.

7. Informan Tambahan 1

Karakteristik informan:

- a. Nama : M
- b. Instansi : Kecamatan Panti
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Jabatan : Ketua BPD Desa Kemiri (Tokoh masyarakat)

Peneliti menemui informan di Kecamatan Panti Kabupaten Jember pada tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 WIB. Sebelumnya, peneliti telah membuat janji temu dengan informan dan menemui informan di ruang kerjanya. Pada saat wawancara dilaksanakan hanya ada peneliti dan informan di depan teras rumahnya.

P: Bentuk sosialisasi BPBD itu seperti apa pak?

I: Praktek lapangan mas semacam simulasi, jadi mengerahkan masyarakat seolah-olah terjadi bencana *beneran*. Jadi masyarakat dibagi menjadi beberapa bagian yang pertama tim reaksi cepat, kemudian *eh..* tim tenda, kemudian dapur umum, kemudian logistic dan evakuasi.

P: Intensitas sosialisasi pak bagaimana?

I: Seingat saya satu kali mas kalau *ndak* salah tahun 2014. Pokoknya tiap tahun mesti ada sosialisasi dari BPBD apalagi kalau menjelang musim-musim penghujan itu..

P: Itu pada saat sosialisasi apakah masyarakat diberi semacam kertas untuk mengetahui tingkat pemahaman terkait apa yang akan disosialisasikan?

P: Apa ada semacam pembentukan/ penunjukan unsur pengarah dari unsur masyarakat pak? Ya tugasnya memberi saran terkait PB?

I: Waduh kalau masalah itu saya kurang paham mas...

I: Tidak ada mas. Jadi kami hanya duduk diam dikasih pengarah terus kami simulasi tadi.

P: Apa ada semacam uang transport pak pas waktu ada sosialisasi?

I: Ada mas, jadi ya diakhir acara kita disuruh absen terus diberi amplop satu-satu.

P: Terkait peringatan dini gimana pak?

I: Ada alat mas untuk mengukur curah hujan. Jadi kita punya orang juga mas di atas untuk memantau. Dan juga kalau ada informasi dari BPBD biasanya

langsung tersalurkan ke HT biasanya langsung ke penguasa desa dalam hal ini pak kades.

P: Apa ada bantuan dana pak untuk pembentukan destana?

I: Tidak ada mas setahu saya, *dana teko endi hahaha* tapi ada bantuan peralatan itupun kami dapat dari Dinsos.

P: Bagaimana peran sumber daya manusia terkait penanggulangan bencana khususnya yang ada di kecamatan panti pak?

I: Jadi mas, di kecamatan panti yang masuk kategori desa rawan bencana itu desa pakis dan desa kemiri. Dengan adanya pembentukan destana ini jadi kami serasa diberi peran untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana. kan tujuannya biar kita bisa mandiri sambil menunggu bantuan misalnya pas waktu terjadi bencana. jadi kami berkomitmen mendukungnya.

P: Terkait perdes gimana pak apa sudah ada untuk desa tangguh bencana ini?

I: Kalau itu bukannya sudah otomatis ya mas *pas* waktu pembentukan ada perdesnya. Kalau belum ya mungkin masih proses mas.

P: Koordinasi yang dibangun seperti apa pak? Baik dengan kecamatan, ataupun dengan dinas-dinas terkait? mungkin ada semacam forum?

I: Belum ada forum mas. koordinasi ya biasanya kita personal aja minta nomer hp sama frekuensi HTnya.

P : Untuk SOP apa ada pak dari BPBD?

I : Setahu saya belum mas. Soalnya belum disosialisasi.

8. Informan Tambahan 2

Karakteristik informan:

- a. Nama : P
- b. Instansi : Kecamatan Silo
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Jabatan : Tokoh masyarakat

Peneliti menemui informan di Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 15.30 WIB. Sebelumnya, peneliti telah membuat janji temu dengan informan dan menemui informan di ruang kerjanya. Pada saat wawancara dilaksanakan hanya ada peneliti dan informan di depan teras rumahnya.

P: Bentuk sosialisasi BPBD itu seperti apa pak?

I: BPBD itu apa ya mas?

P: BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah pak.

I: *Oooh..* ya Sosialisasi kebencanaan mas, tapi kalau ndak salah sudah lama mas dari lembaga asing Jepang.

P: Kalau BPBD belum berarti pak?

I: Seingat saya belum, waktu bencana dulu itu tahun 2009 satlak PB yang bergerak, kalau kemarin itu di kecamatan mas kan gunung raung itu kelihatannya mau meletus. Ya gak tau lagi mungkin sosialisasinya tergantung bencana apa yang ada..

P: Kalau di sini apa ada pembentukan desa tangguh bencana pak?

I: *Ndak* ada mas kalau itu, belum ada itu yang namanya desa tangguh bencana di sini. tapi dulu yang lembaga jepang itu melakukan penelitian di sini nyebar kayak pertanyaan ke warga gitu terus juga ada semacam simulasi.

P: Simulasinya kapan dan tentang apa dulu pak?

I: Simulasi banjir bandang dulu pernah dilakukan kalau tidak salah tahun 2009 mas. Sudah lama dan itu juga dilakukan oleh satlak PB soalnya BPBD belum ada mas.

P: Untuk koordinasi yang dibangun seperti apa pak? Missal ada bencana?

I: Ya biasanya kita langsung menghubungi pihak desa ya ke pak kades mas, misal ada apa-apa apalagi bencana besar seperti banjir bandang longsor nanti dari kades langsung ke kecamatan.

P: Terima kasih atas waktunya pak.

I: Ya mas sama-sama semoga bermanfaat.

9. Informan Tambahan 3

Karakteristik informan:

- a. Nama : H
- b. Instansi : Perhutani KPH Jember
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Jabatan : Kasi Humas

Peneliti menemui informan di Kantor Perhutani KPH Kabupaten Jember pada tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 WIB. Sebelumnya, peneliti telah membuat janji temu dengan informan dan menemui informan di ruang kerjanya. Pada saat wawancara dilaksanakan hanya ada peneliti dan informan di ruang kerja Beliau.

- P: Assalamu'alaikum Pak saya Arifandi dari FKM Universitas Jember akan melakukan wawancara kepada Bapak berkaitan dengan skripsi saya tentang implementasi kebijakan penanggulangan bencana khususnya bencana banjir bandang di Kabupaten Jember.
- I: Oh iya mas silahkan, apa yang bisa saya bantu?
- P: Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pak..
- I: Baik mas...
- P: Terkait sosialisasi pak apakah Perhutani juga dapat dari BPBD Jember?
- I: Oooh sosialisasi dulu ada saat erupsi gunung raung, dan pihak BPBD menjemput bola dengan menemui kita untuk berkoordinasi dengan kita.
- P: Oh gunung raung ya pak, kalau terkait Banjir bandang Panti dan Silo dulu?
- I: BPBD kan baru mas ya belum itu. Waktu itu kan Satlak PB yang menangani bencana yang terjadi di Jember.
- P: Terkait tupoksi pak apa perhutani diberi tupoksi oleh BPBD?
- I: Tupoksi apa ya mas, terkait PB ini? Jadi gini mas kita ini lembaga independen. Kita BUMN jadi bukan perangkat dari Daerah seperti SKPD jadi beda. Yaa kita melakukan kegiatan kita sendiri terkait penanggulangan bencana ini juga gitu, tetapi kalau sekiranya kita tidak mampu ya kita minta tolong ke BPBD setempat.
- P: Terkait Perda apa bapak mengetahui bahwa ada perda penanggulangan bencana di Kabupaten Jember?
- I: Kalau itu saya kurang tau mas. Selama ini pedoman kita itu langsung dari kementerian kehutanan. Jadi ada Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : P.7/V-Das/2011 Tentang Petunjuk Teknis Sistim Standar Operasi Prosedur (Ssop) Penanggulangan Banjir Dan Tanah Longsor.

FROM : BIRO SEKNIT UNIT II

FAX NO. : 031 5474313

9 Aug. 2016 8:37 P2



PERHUTANI

Nomor : *A23/016/S1/Sekdivres/Jember*
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Surabaya, 8 Agustus 2016

Kepada Yth.
 Pembantu Dekan Bidang Akademik
 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember
 Jl. Kallimantan No. 37
 Di - JEMBER

Menarik surat Saudara nomor 2398/UN25.1.12/SP/2016 tanggal 21 Juni 2016 perihal tersebut pada pokok surat yang kami terima tanggal melalui surat Administrator/KKPH Jember tanggal 27 Juli 2016, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui mahasiswa/i Saudara, a.n.:

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Arifandi Hutomo F	112110101145	Kesehatan Masyarakat

Untuk melaksanakan Penelitian tentang "Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti dan Silo)" di wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur pada satuan kerja KPH Jember.

2. Segala biaya, akomodasi dan ijin kepada instansi terkait menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
3. Jangka waktu penelitian terhitung mulai tanggal 15 Agustus s.d. 17 September 2016
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar laporan hasil kegiatan untuk literatur perpustakaan Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
5. Untuk selanjutnya berkoordinasi dengan : KPH Jember Jl. Letjen S Parman No. 4 Jember, Telp. (0331) 336841, Fax. (0331) 336241.

Demikian untuk menjadi maklum.

FAKSIMILE DITERIMA	OPRT
AGENDA No: <i>426</i>	<i>[Signature]</i>
TANGGAL: <i>9-8-2016</i>	<i>[Signature]</i>

Tembusan Kepada Yth.
 - Administrator/KKPH Jember





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. 1. Camat Panti Kab. Jember
2. Camat Silo Kab. Jember
3. Pimpinan Perum Perhutani Jember
4. Ketua LSM Jember Disaster Rescue
di -

T E M P A T

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/990/314/2016

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember tanggal 25 Mei 2016 Nomor : 1893/UN25.1.12/SP/2016 perihal Ijin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Arifandi Hutomo F. 112110101145
Instansi : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan I/93 Kampus Bumi Tegal Boto Jember
Keperluan : Mengadakan Penelitian untuk penyusunan Skripsi berjudul :
"Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti Dan Silo)".
Lokasi : BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan & Kehutanan, Dinas Sosial Kabupaten Jember
Tanggal : 01-06-2016 s/d 31-07-2016

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 02-06-2016

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid Kajian Strategis & Politik


Drs. SLAMET WIDJOKO, M.Si.
Pembina
NIP. 19631212 198606 1004

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan FKM Universitas Jember
2. Ybs



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala BPBD Kab. Jember
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember
3. Kepala Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Kab. Jember
4. Kepala Dinas Sosial Kab. Jember

di -
T E M P A T

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/990/314/2016

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember tanggal 25 Mei 2016 Nomor : 1893/UN25.1.12/SP/2016 perihal Ijin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Arifandi Hutomo F. 112110101145
Instansi : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan I/93 Kampus Bumi Tegal Boto Jember
Keperluan : Mengadakan Penelitian untuk penyusunan Skripsi berjudul :
"Kajian Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Tentang Penanganan Prabencana Banjir Bandang di Kecamatan Panti Dan Silo)".
Lokasi : BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan & Kehutanan, Dinas Sosial Kabupaten Jember
Tanggal : 01-06-2016 s/d 31-07-2016

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 02-06-2016

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER
Kabid Kajian Strategis & Politik


Drs. SLAMET WIJOKO, M.Si.
Pembina
NIP. 19631212 198606 1004

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan FKM Universitas Jember
2. Ybs

Lampiran G. Dokumentasi Penelitian



Wawancara mendalam dengan informan kunci



Wawancara mendalam dengan informan utama



Wawancara mendalam dengan informan utama



Wawancara mendalam dengan infoman tambahan



Wawancara mendalam dengan informan tambahan



Wawancara mendalam dengan informan tambahan